



MAJALAH

Parlementaria

Melihat Tragedi Rempang



EDISI 226
TH. 2023



7 25272 73070 6





Parlementaria

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindy, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Muhammad Husen, Ria Nur Mega, Agung Hidayat, Ridwan Budiman

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danuirta, A.Md,

Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhanani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,

Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA

Melihat Tragedi Rempang

4

4 PROLOG Melihat Tragedi Rempang

8 LAPORAN UTAMA

- Menyelesaikan Konflik Rempang dengan Bijaksana
- Kekerasan Harus Dihindari Atasi Konflik
- Memahami Urusan Agraria Di Balik Investasi Pulau Rempang
- Rempang Eco City: Polemik Investasi dan Rakyat
- Pembelajaran dari Investasi Rempang

18 SUMBANG SARAN Pulau Rempang: Di Antara Masyarakat, Pengusaha, dan Keamanan Negara

20 PENGAWASAN Menanti PP dan Secerch Harapan Para Honoror

22 ANGGARAN APBN 2024 Diharap Turunkan Kemiskinan Ekstrem

24 LEGISLASI RUU ITE Cegah Palsu Karet

26 FOTO BERITA

30 FOTO STORY POR Korpri Setjen DPR: Penguatan Budaya Hidup Bugar

34 KUNKER



PENGAWASAN



Menanti PP dan Secerch Harapan Para Honorer

20

ANGGARAN



APBN 2024 Diharap Turunkan Kemiskinan Ekstrem

22

LEGISLASI



RUU ITE Cegah Pasal Karet

24

- 56** **SOROTAN**
Cegah Karhutla Dengan Sistem Peringatan Dini
- 58** **LIPUTAN KHUSUS**
Majelis Parlemen Asia Dukung Pembentukan Komite Perempuan
- 60** **DAPIL**
- 70** **TOKOH**
CLEVAN LOUIS VALERA OCTAVINUS Sang Pembalap Cilik, Harumkan Bangsa
- 72** **PERNIK**
 - Menyosialisasikan Cara Kerja Legislator kepada Generasi Muda
 - Mengenal DPR dengan Magang di Rumah Rakyat
- 74** **KIAT SEHAT**
Menjaga Kesehatan pada Kondisi Perubahan Iklim
- 76** **WISATA**
Ber-skate Board di Beach Walk Shopping Center Bali
- 78** **HOBİ**
RIEKE DIAH PITALOKA Koleksi Barang Antik
- 79** **POJOK PARLE**
Indonesia Punya Dua Ibu Kota, Kok Bisa?

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id

Melihat Tragedi Rempang

Meletusnya bentrokan di Pulau Rempang pada 7 September 2023 lalu sontak menyedot perhatian masyarakat umum, bahkan beberapa media asing pun ikut menyiarkan kejadian tersebut. Konflik Pulau Rempang adalah gunung es yang berasal dari timbunan berbagai permasalahan di masa lampau.





Pulau Rempang sendiri memiliki luas sekitar 17.600 hektare dengan populasi mencapai 7.500-an jiwa yang mendiami berbagai

kawasan, termasuk beberapa tempat yang diklaim sebagai kampung adat atau kampung tua. Pemerintah telah lama mewacanakan Pulau Rempang sebagai perluasan kawasan industri yang sebelumnya terpusat di Pulau Batam.

Hal ini kemudian dikukuhkan dengan Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992 yang menyatakan Pulau Rempang dan Pulau Galang masuk wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Selama bertahun-tahun lamanya Rempang dan Galang menyandang status quo membuat keduanya urung digarap untuk mendapat nilai tambah. Di tahun 2002 sebuah perusahaan pengembang sempat menjajaki wilayah tersebut, namun baru di tahun 2004 investasi resmi masuk ke Rempang dengan bendera PT Makmur Elok Graha (MEG).

Meski telah mengantongi izin, pengembangan Pulau Rempang pun masih belum bisa dilakukan lantaran statusnya yang juga sebagai hutan lindung. Baru di tahun 2018 sebagian kawasan Rempang beralih status menjadi hutan produksi yang dapat dikonversi. Nama Rempang kembali muncul setelah masuk dalam urutan ke-13 Program Strategis Nasional seperti tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7/2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Dalam peraturan tertanggal 28 Agustus 2023 tersebut termaktub 'Pengembangan Kawasan Rempang

Eco-City di Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan masterplan' pada keterangan yang menjelaskan PSN tersebut. Rencananya Rempang Eco City akan menempati lahan seluas 7.572 hektare atau sekitar 45,89 persen total luasan pulau tersebut. Hal itu juga ditegaskan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia kepada awak media.

"Kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare area Pulau Rempang, hanya 7.000-8.000 hektare lebih yang boleh dikelola, selebihnya hutan lindung," kata Bahlil usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, September lalu. Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penandatanganan sejumlah dokumen kerja sama dalam membangun ekosistem hilirisasi industri kaca dan panel surya di Indonesia dengan Xinyi Glass Holdings Ltd.

Penandatanganan ini dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Chengdu, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pada 28 Juli 2023 silam. Investasi yang disinyalir menembus nilai 11,6 miliar USD dan masuknya Rempang *Eco-City* sebagai salah satu PSN seolah memberikan lampu hijau bagi BP Batam untuk memulai tugas besarnya di Pulau Rempang. Hadirnya investasi ini ternyata membawa banyak dampak termasuk penolakan pengukuran lahan yang akan digunakan untuk Rempang Eco-City lantaran tanah tersebut telah didiami warga.

Selama beberapa minggu warga berhasil menahan petugas BP Batam untuk masuk melakukan pengukuran lahan. Kamis, 7 September 2023 bentrokan pun tak dapat dihindarkan. Warga menghadang kedatangan aparat gabungan terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Ditpam BP Batam di Jembatan 4 Barelang.

Saat bentrok pecah, polisi

menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Sayangnya, tidak hanya pada penghadang yang menjadi korban, tetapi juga murid sekolah hingga balita terkena dampak gas air mata yang disebut terbawa angin itu. Dengan adanya bentrokan yang terjadi pada 7 September dan berlanjut pada 9 September 2023 di Kantor BP Batam, membuat problematika Rempang Eco-City pun tak sebatas permasalahan investasi, ekonomi, dan agraria.

Legislator Dapil Kepulauan Riau, Cen Sui Lan menegaskan investasi yang berlangsung di Pulau Rempang, Batam, jangan sampai menghilangkan hak tinggal masyarakat karena terdampak proyek yang termasuk dalam PSN itu. Politisi Fraksi Partai Golkar ini berjanji akan berjuang untuk kepentingan masyarakat di Kepri, termasuk warga Pulau Rempang. Sehingga, hak masyarakat Rempang tidak terabaikan begitu saja.

"Kita akan kawal, bagaimana investasi tetap ada, tapi hak masyarakat tetap dipenuhi," ujarnya seraya berkomitmen mengawal persoalan yang dihadapi masyarakat Pulau Rempang.

Anggota Komisi I DPR RI yang juga legislator Dapil Kepulauan Riau, Sturman Panjaitan ikut angkat suara. Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu mengapresiasi upaya pemerintah menangani permasalahan yang muncul termasuk secara bertahap melakukan relokasi. Ia pun menekankan bahwa investasi yang datang harus memberikan dampak baik bagi masyarakat.

"Apapun yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan investasi harus berdampak kepada masyarakat untuk kesejahteraannya. Dipindahkan atau apapun itu (harus atas dasar) kesepakatan ke dua belah pihak dan bila mungkin mereka dapat pekerjaan di tempat baru itu," ujarnya saat ditemui *Parlementaria* di Senayan, Jakarta, awal Oktober silam.

 tim/mh

Fakta Proyek Rempang Eco-City



Proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023

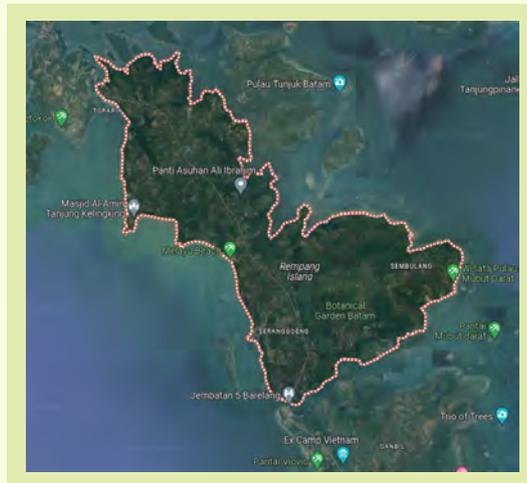
(tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI No.7/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI No.7/2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional).



Pengembangan Rempang Eco-City merupakan kerja sama antara **BP Batam** dan **PT Makmur Elok Graha (MEG)**.



Masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.000 hektare tersebut sebanyak **700 KK**



Peta Pulau Rempang



Nilai investasi ditaksir mencapai **Rp381 triliun** hingga tahun 2080.



Pemerintah menargetkan pengembangan Kawasan Rempang Eco-City dapat menyerap lebih kurang **306.000 tenaga kerja** hingga tahun 2080 mendatang.



Rempang Eco-City akan menyiapkan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia dari Singapura dan Malaysia.



Dari total daratan kerja sama MoU tahun 2004 antara BP Batam dan MEG seluas +- 17.600 Ha, **hanya 8.142 Ha** yang dapat dikembangkan, terdiri dari **570 Ha APL** dan **7.572 Ha HPK**, sisanya merupakan hutan lindung.

Kompensasi yang diberikan kepada masyarakat Rempang



BP Batam menyiapkan rumah singgah serta kompensasi per bulan:

- a. uang tunggu Rp1,2 juta/kepala (acuan BPS)
- b. uang sewa rumah Rp1,2 juta/KK



Akan diberikan rumah pengganti tipe 45 dengan luas tanah 500 meter persegi senilai Rp120 juta.



Apabila masyarakat yang sebelumnya mempunyai rumah nilainya lebih besar dari Rp120 juta, maka selisih dari rumah itu akan diganti oleh pemerintah.



Akan mendapatkan penggantian aset masyarakat (tanaman tumbuh dan bangunan yang berlokasi di HPL) akan dinilai oleh KJPP.

Sumber: paparan Menteri Investasi dalam Raker dengan Komisi VI (2/10)

Item Proyek Investasi Rempang Eco-City

Rencana investasi Xinyi Group USD 11,6 miliar (~Rp174 triliun) di Rempang dengan list proyek:

Pembangunan Kawasan Industri yang Terintegrasi



Pabrik Pemrosesan Pasir Silika



Industri Soda Abu



Industri Kaca Panel Surya



Industri Kaca Float



Industri Silikon Industrial Grade



Industri Polisiikon



Industri Sel dan Modul Surya



Infrastruktur Pendukung



Sumber: paparan Menteri Investasi dalam Raker dengan Komisi VI (2/10)

Menyelesaikan Konflik Rempang dengan Bijaksana

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mendorong proses dialog dan perdamaian mengatasi konflik yang terjadi antar warga dengan aparat di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Lodewijk berharap konflik lahan di Rempang dapat diselesaikan dengan lebih bijaksana.



"Kita berharap kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional terkait dengan hak-hak atas tanah, kalau enggak

tuntas, ya seperti ini. Kita berharap pihak aparat keamanan, baik polisi maupun dibantu oleh TNI tentu menyelesaikan ini secara arif-lah ya," kata Lodewijk.

Konflik antara masyarakat adat di Pulau Rempang dengan aparat gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Direktorat Pengamanan Badan Pengusahaan (BP) Batam dipicu oleh penolakan masyarakat adat Melayu Pulau Rempang atas pembangunan kawasan industri di lahan pulau seluas 17 ribu hektare.

Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini meminta pihak-pihak berkepentingan untuk mengedepankan dialog dengan warga agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara tuntas. Menurutnya, tujuan pengembangan wilayah tersebut merupakan tujuan investasi yang seharusnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

"Duduk lagi bicara lagi, dialog dengan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat di sana, kemudian selesaikan. Pasti ada



FOTO: FARHAN/NIR

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus.

masalah-masalah yang belum tuntas. Nah, diharapkan bisa tuntas, supaya kalau tujuannya investasi, kan, itu memberikan kesejahteraan tetapi kalau itu ternyata awalnya sudah seperti ini, tentu tujuan utamanya tidak tercapai," harap politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Sebelumnya, peristiwa bentrokan antara aparat dengan masyarakat adat Pulau Rempang dipicu oleh rencana pengusuran pemukiman warga untuk dijadikan Rempang Eco City. Warga Rempang masih menolak rencana relokasi yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sebab mereka mengklaim sudah menempati

wilayah tersebut hampir dua abad.

Diketahui, Pulau Rempang akan dibangun Rempang *Eco City*, salah satu proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional 2023. Pembangunannya diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus. Proyek ini merupakan kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi yang ditujukan mendorong daya saing dengan Singapura dan Malaysia.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, menyatakan, pihaknya akan

“

Kita berharap kalau ada kegiatan-kegiatan pembangunan nasional terkait dengan hak-hak atas tanah, kalau enggak tuntas, ya seperti ini. Kita berharap pihak aparat keamanan, baik polisi maupun dibantu oleh TNI tentu menyelesaikan ini secara arif-lah ya.

Lodewijk F. Paulus.
Wakil Ketua DPR RI

memanggil para pengusaha yang akan berinvestasi di Pulau Rempang sebelum memanggil Kapolri. Dia menilai para pengusaha tersebut memiliki bekingan dari pihak tertentu.

“

Bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah.

Ahmad Sahroni.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI



FOTO: JAKA/NR
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

"Banyak pihak yang terkait dan ada dugaan para pengusaha yang dibekingi para pihak," kata Sahroni kepada *Parlementaria*.

Menurut politisi dari Fraksi Partai NasDem ini, penyelesaian konflik di Pulau Rempang tidak semudah perkiraan umum. Kasus ini, bisa jadi percobaan dalam proses penegakan hukum. Sahroni pun meminta pemerintah pusat untuk transparan dan akuntabel soal apa yang terjadi di sana.

Menurut dia, jika kedua hal itu tak dilakukan, Pulau Rempang justru bisa menjadi pulau preman, karena yang berlaku adalah hukum rimba. "Banyak dugaan mafia main di Pulau Rempang. Bentrokan di Pulau Rempang meletus pada 7 September 2023 setelah Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama aparat TNI dan Polri memaksa masuk wilayah itu untuk melakukan pengukuran dan pematokan tanah. Pulau tersebut rencananya akan digunakan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.

Bentrokan itu menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Terlebih aparat sempat melontarkan gas air mata ke arah sekolah dasar yang berada di sana. Meskipun

demikian, polisi menyatakan penggunaan gas air mata itu sudah sesuai prosedur. Selain itu, polisi juga menangkap puluhan orang yang disebut sebagai provokator dalam bentrokan tersebut.

Warga Rempang menyatakan mereka tidak menolak proyek Rempang Eco-City tersebut. Hanya saja, mereka meminta agar 16 kampung tua yang berusia ratusan tahun tidak mengalami penggusuran. Sejumlah lembaga pun sempat mendesak pemerintah mengevaluasi ulang proyek tersebut. Komnas HAM pada 16 September 2023 lalu, menyuarakan hal yang sama dan menyebut terjadi pelanggaran HAM dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Meskipun mendapatkan banyak tekanan, pemerintah memastikan proyek tersebut akan jalan terus. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan, proyek itu harus terus jalan. BP Batam sebelumnya menargetkan warga harus meninggalkan pulau itu paling lama pada 28 September 2023. Kawasan Rempang Eco-City ini akan digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik Tomy Winata. **ssb/mh**

Kekerasan Harus Dihindari Atasi Konflik

Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat di 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang, Kepulauan Riau (Kepri) telah menjadi isu nasional. Warga terancam tergusur oleh pembangunan proyek strategis nasional bernama Rempang Eco City.



FOTO: JAKA/NR

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman.



Konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang, Kepri ini juga menjadi perhatian

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Menurutnya secara prinsip mengatasi konflik dengan

kekerasan harus dihindari.

"Kami melihat ada video-video, ya tentu kan kita perlu dalam. Secara prinsip, kan, harusnya kita menghindari penggunaan kekerasan dalam mengatasi konflik-konflik di masyarakat," kata Habiburokhman. Kejadian bermula ketika beredar kabar di tengah warga Rempang bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta

pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.

Mengetahui kabar tersebut, warga berkumpul. Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan. Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan.



FOTO: JAKA/ANR

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil.

Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.

Atas fakta yang terjadi di lapangan, Habiburokhman dengan Komisi III akan mendalami kasus tindakan represif aparat gabungan terhadap warga di Pulau Rempang, Batam. Dia menyebut mereka sudah berkomunikasi dengan Polri, dan saat ini masih menunggu informasi terbaru. "Kami sudah berkomunikasi dengan pihak Polri. Kami sedang menunggu informasi terbaru dari mereka," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil juga angkat bicara soal konflik antara kepolisian dengan masyarakat adat yang terjadi di Pulau Rempang. Dia mengingatkan tugas polisi adalah mengamankan dan melindungi masyarakat. Bukan melakukan hal sebaliknya yang mengancam dan membahayakan masyarakat adat.

Kami meminta aparat melindungi rakyat. Jadi polisi wajib melindungi rakyat," tegas Nasir kepada media di DPR, awal September lalu. Kejadian

bermula ketika beredar kabar di tengah warga Rempang pada Rabu (06/09) bahwa Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) beserta pihak berwenang akan memaksa masuk ke Rempang untuk melakukan pengukuran.

Berdasarkan kabar tersebut, pada Kamis (07/09) pagi warga berkumpul di Jembatan 4 Bareleng. Sekitar pukul 09:51 WIB, warga melihat ratusan aparat gabungan yang terdiri dari Satpol PP, polisi, TNI, dan Ditpam Batam membentuk barisan di depan jembatan. Aparat gabungan kemudian bergerak ke arah warga yang berdiri di ujung jembatan. Kapolresta Balerang Kombes Pol Nugroho dengan pengeras suara meminta warga untuk mundur.

Ketika aparat mulai merangsek masuk ke kampung, terjadi lemparan batu dari arah warga. Aparat membalasnya dengan menyiramkan air dan menembakkan gas air mata. Gas air mata dilaporkan masuk ke kawasan sekolah, yaitu

SMP 33 Galang dan SD 24 Galang.

Atas kejadian itu, Nasir meminta Kapolri mengevaluasi anggotanya dalam proses penanganan pembebasan lahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau. Dirinya menyoroti kinerja kepolisian yang kurang hati-hati, terutama saat berhadapan dengan masyarakat adat yang akan dibebaskan lahannya di Pulau Rempang untuk proyek startegis nasional (PSN) tersebut.

"Masyarakat adat istilahnya punya tempat dalam struktur sosial dalam desa bahkan nasional. Kita sangat menyayangkan peristiwa itu," kata politisi Fraksi PKS ini. Ia menyayangkan kepolisian yang tidak mengedepankan tindakan persuasif. Sehingga, harus berujung pada penembakan gas air mata. "Perlu kerja sama dengan semua pihak. Seandainya langkah mendeteksi ini dan pencegahan bisa dilakukan dan tidak akan terjadi. Semuanya berjalan dengan damai. Kami sangat sayangkan peristiwa ini terjadi. Apalagi kalau ada penembakan di masyarakat," sesalnya.  **ssb/mih**

Memahami Urusan Agraria Di Balik Investasi Pulau Rempang



FOTO: TIARA/NR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat mengikuti pertemuan pada Kunspek Komisi II DPR RI ke Batam.

Polemik yang terjadi atas pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, ternyata tak hanya perihal investasi dan ekonomi. Urusan agraria ikut terseret ke dalam pusaran masalah pasca bentrokan yang terjadi 7 September 2023 silam.



Merujuk pada Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992, Pulau Rempang masuk wilayah kerja Badan Pengusahaan Batam (BP

Batam) bersama dengan Pulau Galang dan menambah luas "kota industri" itu dari yang sebelumnya hanya terpusat di Pulau Batam.

Dikutip dari situs BP Batam, proyek pengembangan Rempang *Eco City* berdiri di atas lahan seluas 8.142 hektar, dari 17.600 hektar luasan lahan di Rempang.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong sinkronisasi terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di pulau Rempang. Hal ini ia sampaikan menanggapi informasi sertifikat Hak Pengelolaan Lahan

(HPL) Pulau Rempang atas nama BP Batam yang belum diterbitkan.

"Ada PR (pekerjaan rumah) yang tidak selesai atau koordinasi yang tidak terpadu antara BP Batam dengan Pemkot Batam terkait persoalan Rempang ini. Selama ini, BP Batam tidak memiliki HPL di Pulau Rempang, baru mau diurus. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan. Tiba-tiba ada investasi dan membutuhkan status hukum yang jelas ditambah tiba-tiba ada keterlibatan masyarakat di sana yang kemudian timbul masalah," jelas Doli di Batam, Kepri, Jumat (29/9/2023) silam.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengatakan, HPL di Pulau Rempang, Kota Batam untuk investor masih dalam proses pengukuran. Dijelaskannya bahwa pengukuran lapangan dilakukan agar lahan tersebut clear and clean. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saat Mustopa menegaskan, Komisi II DPR RI menanggapi secara serius permasalahan yang terjadi di Pulau Rempang.

Dalam kunjungannya ke Batam, politisi Partai Nasdem itu menyampaikan tidak ada persoalan terkait pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kita ingin memastikan dari sisi pertanahannya. Dari apa yang dijelaskan pihak BPN dari sisi surat, sertifikat, dan sebagainya, tidak ada persoalan apapun. BPN betul-betul clear karena status tanah yang ada di Batam masih bersifat APL (Areal Penggunaan Lain)," jelas Saan.

Saan menambahkan, SK APL saat ini masih dalam proses dan belum



FOTO: TIARA/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat mengikuti Kunspek Komisi II DPR RI ke Batam.

berwujud sertifikat HPL, dimana saat ini masih dalam proses pemenuhan syarat oleh BP Batam. Sebelumnya, dalam kesempatan yang sama Kepala Kantor BPN Provinsi Kepri Nurhadi dalam laporannya menyebutkan, sampai pertemuan tersebut digelar, pihaknya belum menerima permohonan HPL dari BP Batam pada lokasi pelepasan kawasan hutan yang rencananya akan menjadi program pembangunan Rempang *Eco City*.

"Kanwil BPN Provinsi Kepri telah melakukan kegiatan survei pendahuluan di lokasi area prioritas seluas 2.000 Ha. Namun, belum bisa dilanjutkan, karena penunjuk batas tidak dapat menunjukan semua patok yang sudah terpasang, masih terdapat patok yang belum terpasang secara tepat dan benar, dan situasi di lapangan belum sepenuhnya kondusif," jelasnya

Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam juga ikut angkat bicara terutama terkait sertifikat tanah

yang beredar di media sosial. Dirinya memastikan BPN Kota Batam tidak pernah mengeluarkan sertifikat dan klaim yang beredar tersebut dipastikan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Ia pun mengungkapkan, yang menjadi pemicu bentrokan antara warga dengan aparat di Pulau Rempang awal September kemarin adalah terkait pemasangan patok batas untuk wilayah kehutanan.

Saat ini masih belum bisa dipastikan jumlah warga terdampak pembangunan Rempang *Eco City* yang akan direlokasi dari tempat tinggalnya. Ada yang menyebutkan hingga 1.200 KK, adapula yang mencantumkan hanya sekitar 961 KK. Pada rencana awal, warga dari 16 kampung adat yang ada di Pulau Rempang akan dipindah ke Pulau Galang Namun, setelah mendapatkan banyak sorotan pasca bentrokan, akhirnya muncul skenario lain yang digambarkan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman

Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yaitu "pergeseran" ke Tanjung Banon yang masih berada di wilayah Pulau Rempang.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, awal Oktober lalu, Bahlil menyampaikan, pilihan lokasi tersebut berasal dari warga. Di Tanjung Banon akan disediakan rumah dengan luas lahan 500 m2 dan rumah tipe 45 bersertifikat hak milik. Selain itu, dijanjikan juga dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, serta Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.

Terkait dengan persoalan sertifikat tanah, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal meminta BPN berhati-hati dalam mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah, mengingat banyak beredar modus mafia tanah yang ada di tanah air. Berkaca dari persoalan di Pulau Rempang, dirinya mendorong BPN melakukan pengecekan lebih jauh terhadap seluruh sertifikat yang akan dikeluarkan. — uc/mh

Rempang Eco City: Polemik Investasi dan Rakyat

Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau melalui guyuran investasi sebesar USD11,5 miliar, telah menimbulkan konflik antara masyarakat, pemerintah, dan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai pengembang. Komisi VI DPR RI memberi perhatian lebih terhadap permasalahan investasi yang melibatkan masyarakat tersebut.



FOTO: KRESNO/NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Raker Komisi VI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM.



Sarmuji, sebagai Wakil Ketua Komisi VI dalam rapat dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai utusan

pemerintah yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan permasalahan investasi di Rempang, meminta

Kementerian Investasi dan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membuat skema penyelesaian masalah investasi di Rempang secara menyeluruh yang bisa diterima semua pihak.

"Ia menekankan proses sosialisasi, pendataan, dan pendaftaran masyarakat terdampak harus dilakukan secara humanis dengan melibatkan tokoh masyarakat serta aparat pemerintah daerah. Sebab, konflik antara masyarakat dan aparat

gabungan terjadi akibat konflik lahan atas pengembangan proyek investasi dengan target investasi Rp381 triliun hingga 2080 nanti.

Sarmuji menilai, konflik di Pulau Rempang terjadi karena masih ada persoalan yang mungkin belum terkomunikasikan dengan baik. Oleh sebab itu, jalinan komunikasi yang baik dan dapat mengakomodir keinginan masyarakat dengan memahami sosial budaya setempat penting untuk dapat menyelesaikan



FOTO: OIH/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Luluk Nur Hamidah.

permasalahan yang ada.

"(Jika) pemerintah sudah menyediakan sekian-sekian itu terkomunikasikan dengan baik, rumah sudah sediakan, tanah sudah juga disediakan, bahkan saya dengar juga uang pengganti sudah disediakan, uang sampai bangunan rumahnya bisa ditempati juga sudah disediakan. Andaikan itu terkomunikasikan dengan baik, mestinya kan tuntas enggak ada persoalan," jelas politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Investasi Harus Berpihak pada Rakyat

Meski rencana investasi yang akan dilakukan di Pulau Rempang ditargetkan akan menghasilkan nilai investasi hingga Rp381 triliun hingga 2080 dengan serapan tenaga kerja hingga 306 ribu tenaga kerja, Komisi VI menekankan agar setiap investasi harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Terlebih, Pulau Rempang menurut Anggota Komisi VI Luluk Nur Hamidah memiliki akar sejarah yang harus dihormati dan diperhatikan

dalam pembangunan. Sehingga, ia menekankan agar pembangunan yang menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di sana tidak hanya berfokus pada perkembangan infrastruktur, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat.

"Ini adalah akar sejarah yang harus dihormati dan dipertahankan dalam setiap langkah pembangunan. Pemerintah seharusnya tidak hanya melihat potensi ekonomi dari proyek-proyek besar, tetapi juga bagaimana proyek-proyek tersebut akan mempengaruhi dan mungkin mengubah identitas budaya dan tradisional suatu daerah," lanjut politisi Fraksi PKB ini.

Pemerintah, lanjut Luluk, diharapkan tidak menganggap proyek-proyek besar hanya sebagai kesempatan untuk pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menciptakan harmoni antara pembangunan dan kepentingan rakyat. "Proyek Strategis Nasional harus menjadi alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang lebih besar, seperti peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal," harapnya.

Untuk itu, Luluk pun mendorong dilakukan dialog dengan masyarakat Pulau Rempang. Ia menilai, cara-cara represif demi pembangunan sudah waktunya diakhiri. Oleh sebab itu, ia sangat menyayangkan bentrokan aparat keamanan dengan masyarakat Pulau Rempang yang sempat terjadi dipicu kurangnya dialog dengan warga.

Selain tenggat waktu pengosongan Pulau Rempang yang terkesan tiba-tiba, sejumlah perilaku represif aparat keamanan saat membubarkan warga yang menolak untuk direlokasi juga dinilai turut berperan menyebabkan bentrokan.

"Seharusnya ini bisa dicegah. Seharusnya kekerasan ini juga bisa dihindari sekiranya proyek ini tidak dipaksakan mendahului proses dialog dengan warga. Cara-cara represif demi pembangunan sudah waktunya diakhiri. Kita tidak lagi hidup di zaman Orde Baru, masak kita lebih kejam dari Orde Baru!" tambahnya.

— **bia/mh**

Pembelajaran dari Investasi Rempang



FOTO: OJ/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina.

Investasi kadang mengundang konflik, terutama investasi yang harus menggusur tanah rakyat. Tragedi konflik di Pulau Rempang jadi pembelajaran soal investasi, karena harus merelokasi masyarakat adat setempat. Investasi juga sejatinya harus mampu menyerap tenaga kerja lokal, sehingga kesejahteraan masyarakat lokal terjaga.



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengingatkan setiap investasi harus benar-benar menyerap tenaga kerja lokal. Termasuk

dalam penggunaan bahasa yang mudah dimengerti masyarakat

Indonesia. Dari manapun asal investasinya, ia berharap semua kegiatan investasi mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang memang mudah dimengerti masyarakat Indonesia. Sehingga, tenaga kerja dari Indonesia dapat terserap secara maksimal.

"Terutama Xinyi ini dari Cina, Pak. Itu memang boleh kita menggunakan bahasa apa saja tapi tentu kalau

kita lihat Bahasa Inggris. Bahasa Indonesia itu, kan, yang biasa kita pakai untuk kita. Ada investasi luar negeri, tapi kalau Bahasa Cina untuk teman-teman pegawai susah juga Pak. Jadi masyarakat kita belum terbiasa menggunakan Bahasa Cina. Itu diperhatikan juga pak," tegasnya saat mengikuti rapat Komisi VII DPR dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Masih adanya rencana investasi yang berujung konflik dengan warga sekitar, menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah. Konflik akibat rencana investasi di Pulau Rempang menjadi perbincangan publik. Kementerian Investasi/BKPM RI, yang membidangi sektor investasi, harus dapat berbenah.

Anggota Komisi VI Deddy Yevri Hanteru Sitorus berharap,



FOTO: OJI/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dalam Raker dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Kementerian Investasi dapat belajar dari konflik akibat investasi yang terjadi di Rempang, Kepulauan Riau. Ia menilai konflik akibat investasi bukan sesuatu yang baru terjadi. Banyak investasi yang akhirnya menimbulkan perlawanan dan penolakan.

“

Kita harus belajar banyak dari (konflik akibat investasi) Pulau Rempang. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru, selalu terjadi. Dimanapun investasi masuk selalu ada perlawanan

Deddy Yevri Hanteru Sitorus.
Anggota Komisi VI DPR RI

“Kita harus belajar banyak dari (konflik akibat investasi) Pulau Rempang. Dan ini kan bukan sesuatu yang baru, selalu terjadi. Dimanapun investasi masuk selalu ada perlawanan, selalu ada penolakan, selalu ada konflik,” kata Deddy pada Raker dengan Menteri Bahlil.

Deddy pun merinci berbagai hal yang harus dipastikan sebelum investasi dilakukan. Pertama, ia mengatakan bahwa investasi harus disertai dengan pendekatan yang baik kepada masyarakat. Ia mencontohkan apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo saat merapikan pasar di Solo, yang mengedepankan dialog-dialog dengan masyarakat.

Kemudian, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, investasi harus memperhatikan aspek sosiologis dan ekonomis. Sebab, kedua hal tersebut merupakan persoalan mendasar. “Nelayan dipindah dari pinggir pantai jauh dari tempat mereka mencari hidup,

jauh dari tanah leluhur mereka, pasti akan menimbulkan konflik. Nah, ini kan saya kira pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita catet, sehingga tidak terulang di tempat lain,” lanjutnya.

Sebelum melakukan investasi, Deddy menekankan rencana investasi harus disertai krisis manajemen yang baik. Misalnya, dengan memastikan kepastian hukum dalam setiap proses investasi. Aspek lain, menurut Deddy adalah dengan memberikan kepastian bagi masyarakat dapat hidup dengan lebih baik lagi dengan adanya investasi.

“Tolonglah investasi itu diidentifikasi, Pak. Peluang pekerjaan apa saja yang didapat di sana, supaya kita menyiapkan *roadmap* sumber daya manusia di sana. Masyarakat di sana bisa terlibat di dalamnya, tidak hanya jadi *security*, *office boy*, *cleaning service*. Apakah diperlukan kita membuat balai latihan, vokasi, atau segala macam,” harap Deddy.

— **bia/mh**

Pulau Rempang: Di Antara Masyarakat, Pengusaha, dan Keamanan Negara



Oleh:
Tryas Noor Lazuardy
Pengacara

Regulasi dalam menyelesaikan konflik agraria, terlebih antara masyarakat dengan perusahaan terkadang tidak secara khusus ditemukan sebagai dokumen negara yang mengatur hal tersebut, akan tetapi kebijakan tersebut terkadang termaktub atau terkait secara tidak langsung dengan kebijakan mengenai sumber daya alam/agraria, baik yang berupa peraturan perundangan sektoral, penataan ruang, administrasi pertanahan, dan pengelolaan sumberdaya alam/agraria.

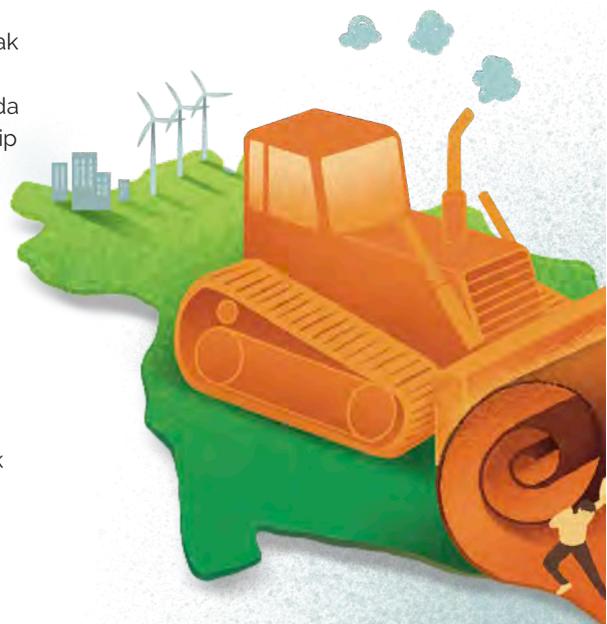
Permasalahan yang terjadi biasanya dibatasi sebagai perselisihan pertanahan antara orang

Proyek strategis nasional yang ditawarkan kepada investor kerap kali mempunyai masalah dengan masyarakat yang telah mendekam lama di suatu daerah. Namun, kesalahan tersebut juga sering kali terjadi karena kelalaian dan kekeliruan lembaga pertanahan untuk mendata aset yang dimiliki oleh masyarakat. Apalagi, pada daerah-daerah terpencil masyarakatnya tidak terlalu sadar pentingnya dokumen-dokumen yang berkaitan dengan legalitas.

perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak terlalu berdampak luas secara sosio politik. Namun, berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang. Mengutip perkataan Menkopohukum Mahfud MD sebelumnya bahwa pemerintah memberikan hak guna usaha atas Pulau Rempang pada tahun 2001-2002 kepada sebuah perusahaan.

Hanya saja, sebelum investor masuk, tanah di Pulau Rempang itu belum digarap dan tidak pernah dikunjungi. Secara umum, sudah pasti hal yang paling menjadi momok masyarakat adalah kehilangan hak kepemilikan atas tempat yang bertahun-tahun mereka huni karena dampak penggusuran yang terjadi. Terlebih lagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah, baik secara sadar maupun tidak sadar pentingnya suatu dokumen kepemilikan.

Relokasi mungkin merupakan 'win win solution' yang akan ditawarkan kepada masyarakat setempat. Namun, hal itu pasti berdampak pada kebiasaan masyarakat yang



Permasalahan yang terjadi biasanya dibatasi sebagai perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak terlalu berdampak luas secara sosio politik. Namun, berbeda dengan apa yang terjadi pada masyarakat Pulau Rempang.

bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mendiami tempat tersebut seperti kebiasaan dalam mencari pendapatan menggunakan sumber daya alam sekitar. BP Batam telah meminta masyarakat mendaftar diri untuk relokasi.

Namun, masyarakat tetap bertahan dan menolak untuk direlokasikan ke rumah susun, dan hak atas

tanah merupakan hak dasar yang diamanatkan konstitusi. Masyarakat harus dilibatkan dalam penentuan relokasi dan tidak bisa diputus hanya sebelah pihak. Masyarakat juga harus diberi kesempatan untuk menilai tempat dimana mereka akan di relokasi. Tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam relokasi akan berdampak cukup besar terhadap

aspek psikologis masyarakat dan cenderung tidak akan mungkin diterima.

Pemerintah sebagaimana fungsinya harus menyosialisasikan permasalahan ini kepada masyarakat dengan cukup baik dan menghargai apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat. Walaupun terlihat "klise" namun permasalahan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, terkhusus dalam hak kepemilikan tanah, sudah sangat menumpuk, tidak hanya Pulau Rempang, namun di seluruh daerah Indonesia terdapat permasalahan agraria yang kurang lebih sama.

Hal tersebut tidak terlepas dari kelalaian pemerintah setempat dan lembaga yang mencatatkan dokumen-dokumen kepemilikan tanah. Terlepas dari konflik antara perusahaan dengan masyarakat, satu lagi hal yang sangat diperhatikan adalah masalah keamanan negara. Secara geografis, dapat dilihat dengan mata telanjang bahwa Pulau Rempang merupakan salah satu pintu masuk dari kawasan Laut China Selatan.

Seperti yang diketahui, Laut China Selatan memiliki nilai geo-strategis, geopolitik, dan geo-ekonomi yang harus dijaga. Hal inilah yang dikatakan sebagai paradox kawasan, di.satu sisi memiliki potensi ekonomi, tetapi di sisi lain masuknya investor asing bisa menjadi ancaman terhadap ketahanan bagi kepentingan negara. Segala sesuatu jangan semata-mata hanya melihat persoalan dari perspektif ekonomis (investasi), tetapi perlu diperhatikan aspek ketahanan NKRI secara holistik.

Mungkin pemerintah hanya mementingkan prestasi dan mengabaikan aspek ketahanan nasional. Ilustrasi, apabila hal yang diukur hanya sekadar kepentingan ekonomi, mungkin ternak babi dengan pasar Singapur lebih baik karena ancaman terhadap keamanan negara tidak ada. 🐷



Menanti PP dan Secercah Harapan Para Honorer

Sidang Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (3/10) lalu secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi Undang-Undang (UU).

Pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) ASN tersebut sempat mengundang beragam polemik dari berbagai pihak. Pasalnya, UU ASN 2023 yang diharapkan akan menjadi payung hukum untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia, saat ini malah tak kunjung ada kejelasan.

Usai sidang Paripurna, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menjelaskan bahwa pengesahaan UU ini akan menjadi payung hukum untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer yang penataannya paling lambat Desember 2024. Meskipun diberi tenggat waktu sampai bulan Desember 2024, namun penghapusan pegawai non ASN tidak akan terjadi.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini mengatakan bahwa pembahasan lebih rinci akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang kini sedang digodok oleh Kementerian PAN RB. Oleh karenanya, ia berharap, pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini secara mendetail dan jelas sebelum bulan Desember 2024.

"Jadi nanti detilnya (pembahasan honorer) akan kita bahas dalam penyusunan rapat rancangan Peraturan Pemerintah (PP)," ujarnya, awal Oktober lalu. Ya, pengesahan UU ASN 2023 menjadi secercah sinar dan



FOTO: DEP/ANR

Ketua Komisi II Doli Kurnia Tandjung saat menyerahkan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai DPR RI mengesahkan RUU tentang ASN 2023 di Rapat Paripurna.

harapan baru bagi tenaga honorer Indonesia untuk bisa menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, jumlah honorer kini lebih dari 2,3 juta orang. Mayoritas tenaga honorer berada di pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang, dari data yang ia terima melalui link haloJG.id/lapor, jumlah honorer di Indonesia mencapai 3

juta lebih. Junimart menegaskan bahwa pengangkatan PPPK tidak hanya sebatas jumlah 2,3 juta saja, melainkan seluruh honorer di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 3 juta.

Pemerintah atas masukan DPR RI mengurungkan niat untuk menghapus tenaga honorer setelah UU ASN 2023 disahkan. Sebab, apabila tenaga honorer dihapuskan, tentu banyak instansi dan lembaga negara yang banyak kekurangan sumber daya manusia (SDM).

Sebagaimana yang diungkapkan

oleh Doli, pengangkatan PPPK baru bisa berlangsung jika turunan dari UU ASN 2023 tersebut, berupa PP telah diterbitkan oleh pemerintah. PP inilah yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana bagi seluruh instansi dan lembaga negara yang akan menjadikan honorer di lingkungannya menjadi PPPK.

Selain itu, dalam PP tersebut, nanti akan ada aturan mengenai kriteria tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK beserta jabatan yang bisa diisi. Doli mengingatkan pemerintah agar UU ASN 2023 pengganti UU Nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini benar-benar bisa menuntaskan masalah honorer.

Selain mendesak terbitnya PP, Doli juga minta pemerintah agar rumusan dalam PP mengatur secara terperinci mekanisme pengangkatan. Jika aturan di PP tidak terperinci, lanjut Doli, maka target penuntasan masalah honorer tidak akan tercapai. Termasuk soal konsep PPPK paruh waktu, harus jelas pengaturannya dalam PP.

"Intinya adalah, kami ingin PP itu harus detail, harus jelas bagaimana kita menyelesaikan



FOTO: MENTARI/INR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

masalah tenaga honorer," tegas Doli. Ditambahkannya, saat ini kita sudah mengenal ASN terdiri dari dua, PNS dan PPPK. Bagaimana nanti mereka semua (honorer, red) ini diangkat statusnya menjadi PPPK, tapi nanti akan ada konsep baru, PPPK itu ada PPPK penuh waktu dan paruh waktu. Itulah yang kemudian harus detail dijelaskan konsepnya.

Pertanyaan kemudian muncul, kapan PP tersebut diterbitkan? Dalam siaran pers yang dirilis oleh Humas MenPAN dalam situs resmi menpan.go.id, Azwar Anas menargetkan, PP turunan UU ASN 2023 akan rampung pada akhir 2023 mendatang. Sekretaris MenPANRB Rini Widyantini juga menginformasikan bahwa PP tentang PPPK tengah dibahas dan akan ditetapkan tiga bulan kemudian.

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal menjelaskan bahwa dalam UU ASN yang baru disahkan beberapa waktu lalu juga menyetarakan penghasilan PNS dan PPPK.

Meskipun penghasilan yang didapat PNS dan PPPK telah disetarakan dalam UU ASN tetap ada yang membedakan kedua status pegawai ini, yaitu perihal masa pekerjaan. Menurut politisi F-PPP ini, masa kerja PNS berlaku sampai pensiun, sementara masa kerja PPPK disesuaikan dengan batas waktu perjanjian atau kontrak kerja yang disepakati dengan pemerintah dalam hal ini lembaga atau instansi yang dinaunginya. — ayu/mh



FOTO: GERALDI/INR

Wakil Ketua Komisi II DPR Syamsurizal.

APBN 2024 Diharap Turunkan Kemiskinan Ekstrem

DPR RI secara resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang APBN Tahun Anggaran 2024 menjadi Undang-Undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.



FOTO: IST/ANR

Ketua DPR RI Puan Maharani saat Konferensi Pers usai Rapat Paripurna DPR RI.

DPR dan pemerintah sepakati APBN 2024 dengan defisit ditetapkan sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB, pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun, belanja negara Rp3.325,11 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp522,8 triliun.

RUU APBN 2024 pun menyepakati belanja Kementerian/Lembaga ditetapkan sebesar

Rp1.090,8 triliun. Sementara, belanja Non-K/L sebesar Rp1.376,7 triliun terutama untuk pembayaran pensiun yang dinaikkan 12% untuk mengikuti perubahan biaya hidup selama 3 tahun terakhir dan juga pemberian subsidi dan kompensasi sesuai perubahan asumsi harga minyak. Kemudian, besaran Transfer ke Daerah dipatok sebesar Rp 857,6 triliun.

Saat memimpin pengesahan

RUU APBN Tahun Anggaran 2024 menjadi UU, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap APBN tahun kepemimpinan terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. APBN 2024 diharapkan dapat menjaga kemampuan fiskal dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional.



FOTO: DEPOJI/NR

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah saat menyampaikan laporan dalam Rapat Paripurna, Kamis (21/9/2023).

Penggunaan konsep Anggaran Berbasis Kesejahteraan (*well-being budget*) pada APBN Tahun Anggaran 2024 juga harus dapat menjadi acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam mengusulkan anggarannya pada tahun anggaran yang akan datang. Seluruh program di Kementerian atau Lembaga diingatkan wajib diarahkan pada program-program yang berkualitas.

"Dengan begitu, alokasi anggarannya dapat dirasakan oleh kelompok penerima manfaat. Anggaran Berbasis Kesejahteraan tersebut juga harus dapat mencerminkan kinerja APBN dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat yang secara langsung dirasakan manfaatnya," ungkap Puan saat konferensi pers, September 2023 lalu.

Di sisi lain, Puan menekankan penguatan sinergi antara DPR dan pemerintah terhadap realisasi arah kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil untuk menjaga stabilitas ekonomi yang dilakukan secara efektif. Ditambahkannya, APBN 2024 diharapkan dapat diprioritaskan untuk program-program prioritas

pemerintahan. Mengingat, tahun 2024 merupakan tahun terakhir kepemimpinan Presiden Jokowi dalam dua periode masa jabatannya hingga masa berakhir bulan Oktober 2024.

Turunkan Kemiskinan Ekstrem

APBN 2024 memberikan ruang bagi pemerintah melakukan penyelesaian masalah kemiskinan ekstrim di Indonesia. Termaktub dalam RUU APBN 2024 bahwa tingkat kemiskinan ekstrem ditargetkan menjadi 0 persen-1 persen. Terkait hal itu, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendukung target besar pemerintah untuk mencapai target tingkat kemiskinan turun ke level 6,5-7,5 persen, dan mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem turun ke level 0-1 persen, yang tidak dicantumkan dalam RAPBN 2024.

Sebagaimana disampaikan Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah dalam Rapat Paripurna, September lalu, pemerintah tidak dengan gamblang menentukan target tingkat kemiskinan ekstrem pada postur RAPBN yang diajukan. Namun, dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem mendekati 0 persen dan tingkat kemiskinan di Indonesia sekitar 6 persen-7 persen pada 2024.

Pada pidato Laporan Banggar DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan tingkat I/Pembahasan RUU APBN 2024, Said menuturkan bahwa memerangi kemiskinan dan pengangguran merupakan mandat konstitusi. Oleh sebab itu, agenda berkelanjutan menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial menjadi tugas yang akan terus didedikasikan sepanjang hayat.

Adapun tingkat kemiskinan ekstrem pada September 2023 telah berada pada kisaran 1,74 persen. Sedangkan prevalensi stunting pada akhir tahun 2022 di angka 21,6 persen dan ditargetkan turun menjadi 17 persen pada 2023. Selain menekan tingkat kemiskinan dan penuntasan kemiskinan ekstrem, Banggar DPR RI bersama dengan Pemerintah mematok sejumlah target indikator kesejahteraan rakyat. — pun/mh

RUU ITE

Cegah Pasal Karet

Rancangan Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) belum lama ini disepakati masa perpanjangan pembahasannya. Hal itu disepakati dalam penutupan masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, awal Oktober lalu di DPR

Adapun perubahan ini disepakati bersamaan dengan perpanjangan pembahasan terhadap tujuh Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga masa persidangan II yang akan datang. Pemerintah melalui Kemkominfo mengusulkan Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Perubahan kedua tersebut perlu memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP).

Secara umum UU ITE memuat dua materi pokok pengaturan, yakni penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan pengaturan tentang *cybercrime*. Revisi UU ITE dilakukan agar dapat menjamin kepastian dan ketertiban di ruang siber dengan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi informasi secara umum.

Kemudian, Menkominfo menyatakan, sesuai pasal 622 ayat 1 huruf r UU KUHP terdapat ketentuan dalam UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, antara lain:

1. Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal.



FOTO: RUMAH/IR

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq R Abdullah.

4. Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.

5. Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

6. Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.

7. Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA.

8. Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal.

9. Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan, dan

10. Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana

terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.

Anggota Komisi I DPR RI Taufiq Abdullah menjelaskan bahwa revisi undang-undang tersebut masih dalam proses pembahasan panitia kerja (Panja). Adapun yang menjadi perhatian dalam revisi ini, yakni memperbaiki agar undang-undang ini tidak menjadi pasal-pasal karet, sehingga diharapkan undang-undang tersebut memiliki kepastian hukum.

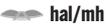
"Lalu yang lain misalnya terkait dengan mengantisipasi berbagai perilaku menyimpang. Saya menyebut perilaku menyimpang,

misalnya yang terkait dengan hoax, penipuan, hate speech," ujar Taufiq ketika ditemui *Parlementaria* beberapa waktu lalu.

Hal lainnya yang saat ini pun menjadi perhatian Komisi I DPR RI dalam pembahasan RUU ini adalah penggunaan media digital untuk bisnis perjudian dan pornografi. Pasalnya, ia menilai bahwa soal perjudian dan pornografi, di samping merusak moral bangsa ternyata ini juga dimanfaatkan oleh mereka yang memposisikan sebagai bisnis baik judi maupun pornografi. "Ini sungguh berbahaya," tekannya.

Ia menilai bahwa harus ada langkah yang sangat maju dari regulasi ini agar

dua perilaku itu bisa diminimalisir seminimal mungkin. Ia mengaku Komisi I DPR RI memiliki concern agar PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) itu juga terlibat di dalam proses moderasi terhadap konten-konten yang tidak pas. "Terutama dua hal itu kita konsen, tentu yang lain juga," ungkap politisi dapil Jawa Tengah VII.

Komisi I DPR RI, lanjutnya, merumuskan diktum-diktum yang memberikan kewenangan sangat besar kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan sekaligus mengeksekusi terhadap pelanggaran. Lalu PSE juga diminta melakukan moderasi secara internal.  hal/mh

Sesuai pasal 622 ayat 1 huruf r UU KUHP terdapat ketentuan dalam UU ITE yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, antara lain:

1. Ketentuan pasal 27 ayat 1 mengenai kesusilaan dan ayat 3 mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik.
2. Ketentuan pasal 28 ayat 2 mengenai ujaran kebencian berdasarkan SARA.
3. Ketentuan pasal 30 mengenai akses ilegal.
4. Ketentuan pasal 31 mengenai intersepsi atau penyadapan.
5. Ketentuan pasal 36 mengenai pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.
6. Ketentuan pasal 45 ayat 1 ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 1 terkait kesusilaan dan ayat 3 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 27 ayat 3 terkait penghinaan dan pencemaran nama baik.
7. Ketentuan pasal 45 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 28 ayat 2 ujaran kebencian berdasarkan SARA.
8. Ketentuan pasal 46 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 30 terkait akses ilegal.
9. Ketentuan pasal 47 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 31 terkait intersepsi atau penyadapan, dan
10. Ketentuan pasal 51 ayat 2 mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal 36 terkait pemberatan hukuman karena mengakibatkan kerugian terhadap orang lain.



Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan para ketua osis yang tergabung dalam Indonesia Student Leadership Camp (ISLC) Universitas Indonesia Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2023). FOTO: RUNI/MAN



Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viafa Hafid menerima kunjungan delegasi empat Anggota Parlemen Jepang yakni Onodera Itsunori, Kihara Minoru, Wada Yoshiaki, dan Matsukawa Rui. Dalam pertemuan tersebut, kedua parlemen membahas mengenai peningkatan kerja sama pertahanan terutama dalam menjaga keamanan maritim, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (19/09/2023). FOTO: RUNI/MAN





Komisi IV DPR RI secara resmi menerima audiensi Yayasan Pusaka Bentala Rakyat dalam rangka memfasilitasi dialog perwakilan 6 suku dari 6 provinsi masyarakat adat Papua berkaitan dengan aspirasi peningkatan perlindungan hak masyarakat adat atas tanah dan hutan adat. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan menyatakan Komisi IV siap memperjuangkan aspirasi dari segenap masyarakat adat Papua tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2023).
FOTO : ARIEF/MAN



Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Kepala Perpustakaan Nasional di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023). Komisi X DPR menyampaikan Perpustakaan Nasional (Perpunas) memperoleh pagu definitif tahun 2024 sebesar Rp725,8 miliar, dengan alokasi anggaran tersebut, program-program peningkatan literasi untuk generasi bangsa bisa dimanfaatkan dengan penuh. FOTO: FARHAN/MAN





Rapat Kerja Badan Anggaran RI dengan pemerintah dan bank Indonesia dalam rangka pembicaraan tingkat I atau pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Selasa (19/9/2023). FOTO: JAKA/MAN



Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (kiri) bersama Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I, Marsekal Muda (Marsda) TNI Bambang Gunarto usai menerima Pangkoopsud I di ruang kerjanya, Senayan Jakarta, Kamis (14/9/2023). FOTO: JAKA/MAN





Badan Legislati (Baleg) DPR RI secara resmi menyetujui penyusunan Program Legislati Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023, Prolegnas RUU Perubahan Keenam Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2024 untuk dibawa ke Pembahasan Tingkat II Rapat Paripurna terdekat, di Senayan, Selasa (12/9/2023). FOTO: GERALDI/MAN



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon usai menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Republik Armenia untuk Indonesia Serob Bejanyan di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023). Turut hadir Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta. FOTO : ENO/MAN



Ketua BKSAP Fadlizon dan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat memberikan Kuliah Umum "Magang di rumah rakyat" Kampus Merdeka, di Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023), berharap para mahasiswa yang mengikuti program Kampus Merdeka di DPR RI ini dapat menjadi agen informasi Keparlemenan yang akan mereka sampaikan kepada publik. Apalagi para pemegang di 'rumah rakyat' ini ialah yang terpilih dari hasil seleksi 26.000 pendaftar magang. FOTO: RUNI/MAN





POR Korpri Setjen DPR: Penguatan Budaya Hidup Bugar

NASKAH: JAKA NUGRAHA FOTO: JAKA, DEVI, RUNI, FARHAN

Setelah vakum beberapa tahun belakangan akibat pandemi covid, Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melaksanakan Pekan Olahraga (POR) Korpri tahun 2023.

Motivasi utama kegiatan ini salah satunya menguatkan budaya hidup bugar di organisasi, karena kesehatan dan kebugaran pegawai menjadi perhatian Setjen DPR. Sebab tak jarang usai purnabakti, mantan pegawai banyak yang

kesehatannya menurun.

Selain itu, POR ini juga dimaksudkan untuk mencari bibit baru para pegawai yang potensial mengikuti gelaran Pekan Olahraga Nasional (Ponas) Korpri yang diadakan setiap dua tahun sekali. Adapun ajang kompetisi olahraga internal Setjen DPR RI ini akan mempertandingkan 6 cabang olahraga, antara lain tenis meja, basket, futsal, badminton, senam, dan tenis lapangan. **jk/mh**





PEMBUKAAN



BASKET





SENAM



TENIS





TENIS MEJA



BOLA



BULU TANGKIS

Menerapkan Standar Keamanan Siber



FOTO: HUSEN/NIR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya saat foto bersama usai Kunspek Komisi I DPR RI di Cikarang.

Pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Kemenkominfo RI, harus menerapkan standar keamanan yang ketat bagi ekosistem siber di Indonesia. Kebocoran data lewat siber sering terjadi di Tanah Air. Untuk itu, PDN diserukan mampu mengidentifikasi kebocoran secara preventif.

Demikian mengemuka dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika), Kemenkominfo di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (15/9/2023) lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya yang memimpin delegasi Komisi

I ini, mengatakan, pembangunan PDN yang efektif, akan mampu mengidentifikasi kebocoran data, bahkan dapat melakukan pencegahan kebocoran tersebut secara preventif.

Disampaikan Riefky, pembangunan PDN, merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah, khususnya Pasal 27

Berbasis Elektronik (SPBE). Pembangunan PDN ini, lanjutnya, akan menjadi ekosistem untuk menampung data yang begitu masif di lingkungan pemerintahan.

"Maka dari itu, kunjungan kerja Komisi I DPR RI ini, ingin mengetahui secara komprehensif soal perkembangan pembangunan PDN sekaligus melihat bagaimana upaya PDN dalam menaruh standar keamanan, sehingga dapat meminimalisir kebocoran data di lingkup pemerintahan," ungkap politisi Partai Demokrat itu.

Dirjen Aptika Samuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan, saat ini PDN sedang dibangun di Cikarang dengan menempati areal lahan 5 hektar. PDN ini, melengkapi pembangunan PDN yang sudah ada di Batam dan Labuabajo. Di IKN, PDN dengan kapasitas yang lebih besar

juga sedang dibangun. PDN berperan mencegah kebocoran data siber di Indonesia. Terakhir, ada 107 kasus kebocoran data, termasuk kebocoran data nasabah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Dalam kesimpulan pertemuannya, Riefky menyampaikan, Kemenkominfo RI agar memastikan pemenuhan prosedur administratif yang berlaku dengan mengedepankan prinsip *good governance* dan memperhatikan prinsip keamanan yang mengacu pada praktik *cyber security* yang andal untuk mendorong koordinasi yang aman terkait bagi pakai data.

Sementara tim kunjungan kerja spesifik Komisi I DPR ke Serang, Banten, masih membahas keamanan pada persiapan Pemilu 2024 dengan mengunjungi Korem 064/Maulana Yusuf. Peran TNI sesuai dengan tugas dan fungsinya pada pemilu ini adalah

membantu Polri dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu. Dalam usulannya, personel TNI yang ikut membantu pengamanan pemilu di Banten mencapai 69 persen.

"Komisi I DPR RI mencatat usulan kebutuhan yang telah disampaikan Korem 064/ Maulana Yusuf, antara lain untuk dukungan kekuatan personel militer yang baru mencapai 69 persen dan belum adanya anggaran untuk pengamanan Pemilu 2024," ujar Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimpin kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Korem 064/ Maulana Yusuf, Jumat (15/9/2023) lalu.

Tak hanya itu, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, Komisi I DPR juga sepakat mendukung usulan TNI diberi tugas dan tanggung jawab yang sama dalam pengamanan Pemilu 2024, khususnya di TPS. Ini untuk menciptakan pelaksanaan

pemilu yang aman dan damai di wilayah tugas Korem 064/Maulana Yusuf.

"Selanjutnya, tim kunjungan kerja Komisi I DPR RI menyampaikan usulan kebutuhan tersebut sebagai bahan masukan dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, beserta Kepala Staf Angkatan Darat," pungkas Utut menutup kesimpulan rapat.

Sebelumnya, Komisi I DPR dalam rapat itu telah mendengarkan paparan Danrem 064/Maulana Yusuf mengenai perkembangan situasi dan hal-hal menonjol, serta kerawanan dan ancaman, baik militer maupun non militer yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pemilu 2024. Tim Kunjungan Kerja Komisi I DPR RI pun mengapresiasi langkah proaktif Korem 064/Maulana Yusuf.

— mh, pun/mh



FOTO: RUMINTHO/NR

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat foto bersama usai memimpin Tim Kunspek Komisi I DPR RI ke Korem 064/ Maulana Yusuf.

Pengurangan Mahasiswa Baru IPDN Disesalkan



FOTO: HUSEN/NIR

Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia Tanjung saat foto bersama usai Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Kampus IPDN, Sumedang.

Kuota penerimaan mahasiswa baru di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mengalami pengurangan. Kondisi ini disesalkan Komisi II DPR RI. Padahal, negara ini dan daerah-daerah di Indonesia terus berkembang, sehingga membutuhkan banyak sumber daya aparatur dari IPDN.

Pada pertemuan Komisi II DPR dengan Rektor IPDN Hadi Prabowo di Kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, mengemuka persoalan pengurangan mahasiswa baru ini. Ketua Komisi II DPR Doli Kurnia Tanjung yang memimpin pertemuan mempertanyakan pengurangan

tersebut. Ke depan, pelayanan publik membutuhkan banyak pegawai, salah satunya dari lulusan IPDN.

"Mengapa jumlah penerimaan mahasiswa untuk IPDN ini berkurang. Padahal, kita tahu kebutuhan pelayanan publik (semakin banyak) seiring negara kita yang makin berkembang," ujarnya, Kamis (21/9/2023) lalu. Doli

mengemukakan, ketika banyak daerah menuntut pemekaran, maka kebutuhan aparaturnya juga semakin banyak. Apalagi, pemekaran daerah itu tak bisa dihindari sebagai bukti bahwa Indonesia berkembang.

"Pemekaran itu tidak bisa dihindari. Suatu saat suka atau tidak suka pasti harus dimekarkan. Ini konsekuensi bahwa Indonesia berkembang. Negara ini terus tumbuh dan maju. Penduduknya bertambah, maka kebutuhannya juga bertambah. Dan kalau kebutuhannya itu bertambah, maka orang yang melayani itu juga harus ditambah," papar politisi Partai Golkar itu.

Pada tahun-tahun sebelumnya, penerimaan mahasiswa baru IPDN

mencapai 1.410 formasi. Pada tahun 2023 ini jauh berkurang, hanya menerima 534 formasi. Rektor IPDN Hadi Prabowo menjawab, soal pengurangan tersebut merupakan keputusan dari Kementerian PAN RB. Apalagi, anggaran untuk IPDN juga jauh berkurang sejak ada pandemi Covid-19 lalu.

Sementara di Bogor, Jawa Barat, tim Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II Syamsurizal meninjau pelaksanaan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik di Kantor Bupati Bogor, Kamis (21/09/2023) lalu. Syamsurizal mengatakan, salah satu yang menjadi perhatian adalah jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar.

"Tadi sempat diinformasikan ke kita jumlah penduduk kabupaten Bogor lebih besar dari satu Provinsi Bengkulu, padahal ini sebuah kabupaten," tuturnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri tercatat, jumlah penduduk Kabupaten Bogor sebanyak 5,39 juta jiwa pada Juni 2022. Jumlah tersebut menjadikannya terbanyak se-Provinsi Jawa Barat dan juga se-Indonesia.



FOTO: RIZKI/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY.

Untuk itu, menurutnya catatan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Ia menilai, pelayanan publik yang optimal menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. "Saya kira ini memerlukan perhatian khusus untuk mewujudkan pelaksanaan UU No.25/2009 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya," jelas legislator Dapil Riau I itu.

Dirinya mengatakan berdasarkan

hasil kunjungan yang dilakukan, Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan telah menyiapkan sejumlah terobosan dalam memberikan pelayanan publik yang optimal di wilayahnya.

"Tadi sudah disampaikan ada 95 jenis pelayanan digital yang sudah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Saya kira ini tidak sedikit jumlahnya, cukup besar. Ada pelayanan pemberian izin, informasi, dan lain-lain," ungkapnya.

Selain itu, Syamsurizal mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada sejumlah unit pelayanan publik yang belum tersedia di Gerai Pelayanan Publik Kabupaten Bogor yang berada di AEON MALL Sentul City.

Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tengah menyiapkan Mal Pelayanan Publik (MPP) sendiri di wilayahnya. "Dalam waktu yang tidak begitu lama akan segera dibangun mal pelayanan publik, hal itu merupakan bagian dari langkah untuk meningkatkan pelayanan publik," tambahnya.

mh, rr/mh



FOTO: RIZKI/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat berfoto bersama pada kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke DIY.

Tidak Ada Keringanan Hukum bagi Pelaku Kekerasan Seksual



FOTO: BALIGYS/NIR

Ketua Tim Kunker Wihadi Wiyanto saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Komisi III ke Batam.

Komisi III DPR RI menyoroti pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Provinsi Batam, Kepulauan Riau (16/10) lalu. Pasalnya, efektifitas sistem peradilan pidana terpadu merupakan tonggak penting dalam menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Tujuan kunker ini dalam rangka melakukan tugas pengawasan, mencari informasi dan menyerap aspirasi terkait belum optimalnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Kepulauan Riau, Batam,"ungkap Ketua Tim Kunker

Wihadi Wiyanto saat memimpin Tim Kunker Komisi III DPR ke Kepulauan Riau, Batam.

Diketahui, sistem peradilan di Kepulauan Riau, Batam terus melakukan inovasi dalam memproses setiap pengaduan masyarakat serta menciptakan peradilan yang bebas KKN. Namun,

disampaikan ada beberapa hambatan yang perlu mendapat dukungan dari Komisi III, diantaranya anggaran yang minim hingga kekurangan SDM.

Komisi III DPR RI menyoroti peningkatan kasus kekerasan seksual di Sumatera Selatan. Diketahui berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumatera Selatan, tercatat jumlah kekerasan seksual dari Januari hingga Juli 2023 sebanyak 376 korban yang terdiri dari 111 korban perempuan, 202 korban anak perempuan dan 63 korban anak laki-laki.

"Kalau korbannya adalah anak dan juga kaum disabilitas itu tidak ada ruang (keringanan hukum). Itu

harus dinyatakan bersalah. Oleh karena itu, titipan saya kepada para jaksa, semuanya, tidak ada ruang (keringanan hukuman) sedikitpun bagi kasus kekerasan seksual," ucap Adde saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (11/8/2023).

Selain itu, Legislator Fraksi Partai Golkar itu juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk meningkatkan sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) kepada publik melalui program 'Jaksa Menyapa Sekolah'. Upaya ini dinilai Adde penting sebagai langkah pencegahan sekaligus melindungi warga negara dari kejahatan kekerasan seksual.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti kasus tambang ilegal yang menimbulkan polemik berkepanjangan antara negara, masyarakat dan lingkungan. Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo mendorong Asisten Intel dan Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Sumsel) untuk berperan maksimal menangani



FOTO:SAJUM/NR

Anggota Komisi III DPR RI Heru Widodo saat mengikuti pertemuan Kunker Komisi III DPR RI ke Kota Palembang.

kasus tambang ilegal di wilayah tersebut.

"Kerugian negara mencapai 60 triliun akibat tambang ilegal. Maka perlu dilakukakan penindakan. Saya ingin Asisten Intel dan Asisten Tindak

Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi mengambil peran besar selesaikan tambang ilegal," ungkap Heru.

Perlu diketahui, terhingga tahun 2023, ada 2.100 aktivitas penambangan ilegal di Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu aktivitas penambangan ilegal yang cukup marak adanya illegal drilling di empat kabupaten, yaitu Musi Banyuasin, Pali, Muara Enim, dan Musi Rawas Utara.

Bahkan, ada 7.000 lebih sumur minyak ilegal yang dikelola secara sembarangan di Kabupaten Musi Banyuasin. Menyoroti aktivitas ilegal ini, Politisi Fraksi PKB itu melihat ada potensi tindak pidana korupsi jika dibiarkan tanpa penindakan yang tegas.

"Ini menjadi tragis karena ada celah tindak pidana korupsi. Maka kejaksaan juga harus maksimalkan penegakan hukum, maka banyak yang bisa diselamatkan termasuk keuangan negara kita yang diselamatkan bisa lebih besar," tutup Heru — ts, gys/mh



FOTO:SAJUM/NR

Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Kota Palembang.

Beras, Perikanan, dan Sawit Jadi Perhatian

Persoalan krusial di sektor pertanian jadi perhatian serius Komisi IV DPR RI. Dari mulai beras, perikanan, hingga sawit, jadi perbincangan menarik saat Komisi IV DPR menggelar kunjungan kerja spesifik ke berbagai daerah. Fenomena el nino jadi persoalan yang ikut membumbui sektor pertanian.

Di Serang, Banten, Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mendesak pemerintah menyelesaikan persoalan kenaikan harga beras mulai dari hulu. Kenaikan yang terjadi karena faktor inflasi salah satunya disebabkan el nino. Meskipun demikian, ia menyangsikan el nino sebagai satu-satunya faktor yang menyumbang kenaikan harga beras.

"Pemerintah diserukan Kiki (sapaan akrab Riezky Aprilia) bergerak cepat bukan hanya melalui operasi pasar dan distribusi Bansos. Tapi, aspek hulu harus dipertimbangkan keseimbangannya. Aspek hulu ini menyangkut petani, bibit, pupuk, dan lain-lain, katanya di Serang, Banten, Jumat (15/9/2023) silam.

"Bagaimana mau memproduksi secara maksimal para petani, apabila pupuk tidak tersedia, apabila bibit



FOTO: MENTARI/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV ke Serang.

dan benih juga tidak maksimal pengairannya. Hari ini, memang, kita harus akui curah hujannya rendah, akan tetapi bukan berarti tidak ada solusi," ujar politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.

Ia menegaskan, pemerintah terus berkolaborasi dengan Komisi IV DPR RI untuk menyisir persoalan kenaikan harga beras ini. "Karena yang namanya alam, kan, tidak bisa kita lawan, tetapi mensiasati agar stabilitas harga beras, ketersediaan beras di pasar tetap ada dan mampu dikonsumsi oleh masyarakat.

Di Sukabumi, Jawa Barat, Komisi IV DPR RI mendorong pembenahan kondisi balai besar perikanan air tawar yang berada di Sukabumi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budhy Setiawan, Jumat (15/9/2023) silam, mengatakan, kondisi infrastruktur

balai besar perikanan air tawar Sukabumi sudah berusia hampir satu abad, yaitu berdiri sejak tahun 1914.

"Tentunya beberapa fasilitas infrastruktur perlu ada perbaikan termasuk sarana prasarana teknologi. Kita akan mendukung pembenahan. Ini penting mengingat UPT ini bisa menjembatani beberapa persoalan strategis terutama khusus pangan, karena ikan menjadi alternatif pangan murah termasuk juga mengentaskan masalah stunting," kata Budhy.

Budhy menjelaskan dilihat dari potensinya sektor perikanan khususnya perikanan budidaya mampu dijadikan penopang ketahanan pangan, karena ikan merupakan bagian penting dari bahan pangan masyarakat Indonesia yang menyumbang lima puluh persen dari seluruh asupan protein hewani dan

berperan sebagai sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi ke bawah.

"Ikan mampu menjadi solusi karena nilai protein yang murah ini menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan krisis pangan dan solusi atas permasalahan gizi buruk dan gizi berlebih yang menyebabkan stunting," jelasnya. Anggota Fraksi Partai Golkar DPR ini juga menerangkan, budidaya ikan air tawar memiliki potensi ekspor yang sangat tinggi khususnya ikan tilapia dan Oktober mendatang pembangunan balai khusus untuk pembenihan ikan tilapia di Karawang juga sudah mulai beroperasi, kita bisa melihat hasil dari tilapia yang berukuran besar.

Sementara di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Komisi IV DPR RI mendorong pemerintah mengencangkan sosialisasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, usai memimpin Komisi IV DPR yang melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Batu



FOTO: ARIEF/NR

Wakil ketua komisi IV DPR RI Budhy Setiawan saat meninjau balai besar perikanan air tawar di Sukabumi.

Bara, Provinsi Sumatera Utara, Jumat (15/9/2023) silam.

Menurutnya, masih banyak masyarakat yang enggan dan takut

mengikuti program PSR ini. Data dari Kementerian Pertanian, secara nasional, hanya ada sekitar 30.000 hektar PSR baru di tahun 2023 dari yang ditargetkan seluas 180.000 hektar. Sudin menyayangkan hal tersebut, mengingat program ini dicanangkan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat bertani sawit.

"Makanya tadi saya bilang target di Sumatera, kok, 500 (hektar) tapi hasilnya nol. Jadi, jangan buat target tinggi-tinggi tapi hasilnya nol. Yang saya inginkan adalah targetnya kecil, tapi produktivitasnya bertambah," ujar Sudin kepada *Parlementaria*.

Lewat kunspek tersebut ditemukan berbagai alasan masyarakat enggan mengikuti PSR. Beberapa di antaranya adalah persyaratan yang rumit, isu-isu miring akan dijualnya tanah petani jika mendaftarkan tanahnya untuk program PSR, hingga kurangnya pemahaman masyarakat akan keuntungan yang bisa didapatkan dari program tersebut. — mri, afr, ndn/mh



FOTO: MADHEN/NR

Ketua Komisi IV DPR RI Sudin saat memimpin Tim Kunspek Komisi IV ke Sumatera Utara.

Meninjau Perbaikan Infrastruktur Daerah

Komisi V DPR RI terus memantau perbaikan infrastruktur daerah yang telah dianggarkan. Di Bogor - Jawa Barat, Komisi V DPR memantau dari dekat perbaikan Jembatan Cikereteg, di Wonosobo, Jawa Tengah, melihat penataan kawasan wisata Dieng, dan di Bekasi, Jawa Barat, mengunjungi Waduk Jatiluhur.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw yang memimpin kunjungan

ke Kabupaten Bogor, mendorong percepatan proyek perbaikan Jembatan Cikereteg yang diproyeksikan rampung pada Oktober 2023. Jembatan yang sempat runtuh karena longsor itu, perlu segera diperbaiki untuk memudahkan akses masyarakat bertransportasi. Komisi V ingin menginventarisasi segala kebutuhan dan permasalahan, sehingga bisa dilintasi semua jenis kendaraan secara normal.

"Dari hasil kunjungan ini, kami mengapresiasi kerja teman-teman PUPR yang begitu tanggap dan respons dalam memberikan pelayanan penanganan kerusakan jembatan ini dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Kami lihat progresnya



FOTO: GERALDI/NR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw bersama tim saat meninjau perbaikan Jembatan Cikereteg di Bogor.

sangat cepat, hanya delapan bulan. Kami yakin Oktober 2023 bisa selesai," kata Roberth di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023) lalu.

Roberth mengemukakan rampungnya Jembatan Cikereteg berdampak besar terhadap mobilitas masyarakat, pemerataan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. "Sejak terjadi longsor yang mengakibatkan terputusnya akses jalan Bocimi, ini langsung menjadi perhatian kami. Maka Komisi V sebagai mitra pemerintah di bidang infrastruktur memberikan dukungan penuh agar segera menangani masalah ini," ujar politisi Fraksi NasDem ini.

Roberth mengatakan akses

Jembatan Cikereteg sangat dibutuhkan masyarakat, sebab menjadi penghubung dua daerah. Ia juga memberikan apresiasi pada Kementerian PUPR yang telah merespon cepat. "Kami apresiasi karena responnya cepat dan bulan Oktober sudah bisa digunakan seutuhnya," kata Roberth.

Di Wonosobo, Komisi V melihat penataan kawasan wisata Dieng yang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp82,2 miliar. Penataan dimulai pada 2023 dan akan selesai pada 2024. Penataan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Wisata Dieng ini diharapkan mampu mengubah wajah Kawasan Wisata Dieng yang baru tanpa menghilangkan nilai

artistik dan potensi alam yang ada, agar lebih menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras yang memimpin kunjungan ini menyampaikan bahwa Komisi V DPR ingin melihat secara langsung proses penataan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Dieng, sekaligus menyerap aspirasi maupun masukan-masukan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo.

"Kehadiran Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja pada hari ini ingin mengetahui secara langsung dan menggali informasi, sudah sejauh mana penataan KSPN Dieng dilaksanakan. Kami berharap dengan adanya penataan kawasan wisata ini, akan mendorong pertumbuhan ekonomi di dua kabupaten di Provinsi Jateng," ungkap Andi Iwan, di Dieng, Jawa Tengah, Jumat (15/09/2023) lalu.

Sementara di Bekasi, Jawa Barat, delegasi Komisi V DPR dipimpin Wakil Ketua Ridwan Bae meninjau pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur. Kunjungan ini untuk melihat pemenuhan



FOTO: SINGGIH/NR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras saat memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke Kawasan Wisata Dieng.

kebutuhan air minum sekaligus untuk mengurangi penggunaan air tanah oleh masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus memberikan perhatian lebih terhadap ketersediaan infrastruktur air minum, yang merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

"Pada kunjungan spesifik ini, Komisi V DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait sejauh mana progres pembangunannya dan apa saja kendala yang dihadapi untuk ditentukan solusinya," terangnya dalam sambutan pertemuan, di Jatiluhur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023) lalu.

Disampaikan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (3) Tata Tertib DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, hasil kunjungan spesifik ini akan dilaporkan dalam rapat komisi dan dijadikan bahan pembahasan pada rapat kerja dan RDP dengan mitra Komisi V untuk ditentukan tindak lanjutnya.

"Kami berharap dengan dibangunnya SPAM Jatiluhur ini, Masyarakat di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Kerawang dapat memperoleh akses air minum dan sanitasi aman serta berkelanjutan bagi semua, sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam SDGs demi terwujudnya 90 persen akses air minum layak dan 15 persen akses air minum aman," jelasnya. — go, skr, hal/mh



FOTO: HIRAN/NR

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama rombongan tim saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke SPAM Jatiluhur.

Mengawasi KEK Kesehatan dan KUR



FOTO: RUNI/NR

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VI di Sanur.

Di Kota Denpasar, tim kunjungan kerja reses yang dipimpin Wakil Komisi VI DPR RI Martin Manurung melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sanur, Bali. Dalam kunjungan itu, Martin mengatakan pembangunan KEK Kesehatan yang bertaraf internasional dan pertama di Indonesia itu sudah mencapai 60 persen.

Di harapkan pembangunan ini cepat selesai dan dapat mempertahankan komitmen pemerintah dalam memberikan fasilitas layanan kesehatan yang lengkap dan berkualitas internasional, dengan

dokter-dokter terbaik dunia," jelas Martin di Sanur, Bali, Rabu, (4/10/2023) lampau.

Konsep pembangunan KEK Kesehatan yang merupakan intergasi pembangunan antara fasilitas kesehatan dan pariwisata ini juga diharapkan dapat menekan angka devisa masyarakat Indonesia yang

berobat keluar negeri. "Pemerintah perlu merekrut dokter terbaik dan menyediakan fasilitas kesehatan bertaraf internasional. Komisi VI akan terus memantau perkembangan KEK Kesehatan ini untuk menjadi fasilitas kesehatan dunia," tutupnya.

Pengawasan Pelaksanaan KUR

Sementara di Kabupaten Gianyar, Komisi VI mengawasi pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bali. Anggota Komisi VI DPR RI, I Nyoman Parta, mengapresiasi rendahnya tingkat Non-Performing Loan (NPL) pada KUR yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali. Data dari Bank Himbara (BRI, BNI, Mandiri, BTN) menunjukkan bahwa tingkat NPL

tersebut rata-rata berada di angka nol koma.

Ini mencerminkan tingginya kepatuhan para pelaku UMKM dan pertumbuhan pinjaman KUR yang signifikan, terutama pasca pandemi Covid-19. "Kami mengapresiasi para pelaku UMKM di Bali karena tingkat NPL yang sangat rendah. Ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi dalam memanfaatkan KUR," katanya.

Selain itu, I Nyoman Parta juga memberikan apresiasi kepada Bank Himbara atas akses modal yang baik kepada pelaku UMKM di Bali, yang tercermin dalam peningkatan pertumbuhan pemanfaatan KUR di daerah tersebut. Pertumbuhan pinjaman KUR yang signifikan ini menunjukkan perbaikan yang berarti bagi UMKM di Bali pasca Covid-19.

Terakhir, tim kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih melakukan pertemuan dengan BUMN yang menangani ketahanan energi. Dalam pertemuan itu, Komisi VI menanyakan ketahanan energi di Bali.



FOTO: GALUH/NR

Anggota Komisi VI DPR RI I Nyoman Parta saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi VI ke kabupaten Gianyar.

Demer, sapaan akrab Sumarjaya Linggih, menilai, pengawasan ketahanan energi ini penting untuk pemerataan pembangunan di Bali, terutama terkait listrik dan BBM. " Kami ingin melihat langsung tugas BUMN sebagai *Agent of Development* dalam mewujudkan Ketahanan Energi. Terutama ketersediaan jaringan listrik untuk rakyat dan ketersediaan

BBM baik untuk industri, rumah tangga, nelayan, dan seluruh aspek kehidupan di Bali," tegas politisi dapil Bali itu, Rabu (4/10/2023) silam.

Pihaknya berharap BUMN seperti Pertamina mampu meningkatkan kualitas pengelolaan energi, mendukung ketahanan energi nasional, dan memastikan pasokan energi yang cukup, terutama saat acara besar. — gal, hnm, rni/mh



FOTO: HANUM/NR

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih saat bertukar cenderamata usai melakukan pertemuan kunker reses ke Kabupaten Badung, Bali.

Mengawasi Distribusi BBM dan Pengelolaan Tambang Emas

Saat Komisi VII DPR RI berkunjung ke Provinsi Bali, distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi sorotan dan pembahasan. Misalnya, LPG 3 kg harus terawasi dengan baik. Selain itu, kebijakan satu harga BBM di seluruh Indonesia juga jadi isu menarik yang dibahas.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat mengunjungi

Depot Pengisian Pesawat udara (DPPU), Bandara Ngurah Rai dan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM), Manggis di Denpasar, Bali, menyatakan, pengaturan distribusi BBM bersubsidi termasuk LPG 3 kg sangat penting. Ini dilakukan agar tak melampaui kuota yang telah ditetapkan pemerintah bersama DPR RI. Distribusi harus tepat sasaran untuk menjamin masyarakat golongan tertentu mendapatkan haknya menikmati subsidi.

"Saya pikir untuk menunjang kegiatan ekonomi dan industri yang berpusat pada sektor pariwisata, harus terjamin dan terjaga, karena sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian tersebut dan juga untuk kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran TBBM dan DPPU Pertamina dan jaminan pasokannya di Provinsi Bali menjadi

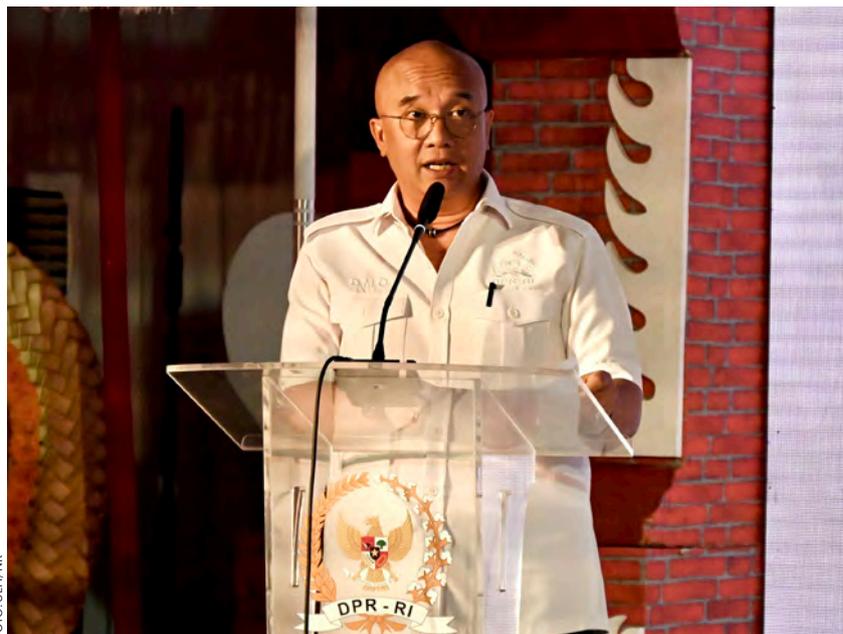


FOTO:ULIF/ANR

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon saat memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali.

sangat penting," tegasnya kepada *Parlementaria* di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, Kamis (21/9/2023) lalu.

Demi mewujudkan keadilan energi di seluruh wilayah Indonesia, Pemerintah kita menerapkan kebijakan BBM satu harga melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan secara nasional. "Kami mendorong peningkatan pengawasan dan koordinasi dengan semua pihak termasuk Polda agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak kita harapkan, agar subsidi dan harga dapat dirasakan manfaatnya oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan," pungkasnya.

Sementara di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Komisi VII

mengawasi tata kelola pertambangan emas, terutama yang dikelola PT. Bumi Suksesindo (BSI). Anggota Komisi VII Bambang DS, menilai bahwa pengelolaan tambang emas oleh PT. BSI dapat ditiru oleh pengelola tambang lainnya.

"Saya senang, ini bisa dijadikan contoh. Biasanya kami Komisi VII mengejar, menanyakan, terkait dengan reklamasi di area pertambangan, seperti di Sumatra, Kalimantan, dan sebagainya. Sering kami dapati, area bekas penambangan seperti bopeng. Apalagi, kalau dilihat dari pesawat. Komitmen untuk melakukan reklamasi masih sangat memprihatinkan. Tapi nampaknya, di BSI ini beda. PT. BSI melakukan reklamasi tanpa menunggu selesai operasi," papar Bambang di PT. Merdeka Copper Gold Tbk

(PT. Bumi Suksesindo/BSI), Kamis, (21/9/2023) lalu.

Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu, menilai bahwa reklamasi yang sudah mulai dilakukan oleh PT. BSI sejak 2018 tersebut juga memperhatikan kondisi lingkungan, serta mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah (Pemda) setempat, sehingga saat ini kondisi lingkungan di kawasan tambang menjadi sangat baik. "Yang menarik, komitmen perusahaan, tidak hanya menanam, tetapi juga memperhatikan faktor keanekaragaman hayati," ucap Bambang.

Kemudian, lanjut Bambang, selain jarak tanam yang cukup rapat, PT. BSI juga memperhatikan persoalan siklus hewan, seperti tanaman biji-bijian yang akan mengundang kehadiran sejumlah satwa, seperti burung. Kawasan pertambangan PT. BSI itu seperti kondisi wilayah sebelum dilakukan pertambangan. "Komitmen ini bisa ditularkan oleh kawasan-kawasan pertambangan lain. Tadi saya tanya persoalan operasional untuk reklamasi, sebetulnya sangat terjangkau. Jadi, tidak ada alasan penambang tidak memperhatikan lingkungan," tegas Bambang.



FOTO: ICHA/NR

Anggota Komisi VII DPR, Bambang DS saat mengikuti Kunspek Komisi VII DPR ke PT. Merdeka Copper Gold Tbk (PT. Bumi Suksesindo/BSI).

Sedangkan di Denpasar, Bali, Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring mengatakan, Indonesia harus menjadi negara yang siap menghadapi era transisi energi, yaitu dari energi fosil ke sumber energi hijau dan terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Menurutnya, hal itu harus menjadi perhatian serius pemerintah mengingat saat ini perkembangan teknologi di

sektor energi sangat pesat dan tak terelakkan.

"Siap enggak siap, ya harus siap. Ini, kan, suatu kepastian yang akan terjadi. Ini seharusnya sudah bisa dihitung. Seperti mentransformasikan PLTU ke PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas)," tegasnya kepada *Parlementaria* di sela kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar, Bali, Kamis (21/9/2023) lalu.

Legislator F-PKS DPR ini menjelaskan, tantangan global terkait ketersediaan energi akan menjadi sangat dinamis. "Kalau mau bertahan, ya harus bisa menjaga pasok, yang mana di sini yang sering direbutkan, yaitu food dan energi," ujarnya.

Karena itu, ia meminta pemerintah memberi jaminan pada empat aspek, yaitu ketersediaan (*availability*), keberlanjutan (*sustainability*), keandalan (*reliability*), dan keterampilan (*security*). Di sini ada garansi yang menjamin bahwa pasokan energi akan aman dan kontinyu. Ia pun lantas mencontohkan kesulitan yang dihadapi negara-negara Eropa yang mengalami krisis energi, imbas dari konflik Rusia-Ukraina. — **upi, ica, srw/mh**



FOTO: FITRI/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Tifatul Sembiring saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR ke Denpasar.

Mengawasi Fasilitas Asrama Haji



FOTO: HUSEN/NR

Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi saat meninjau asrama haji embarkasi di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Komisi VIII DPR RI terus melakukan pengawasan terhadap fasilitas yang ada di lingkungan asrama haji di seluruh Indonesia. Awal bulan ini, dalam kunjungan reses, Komisi VIII mengawasi Asrama Haji Balikpapan dan Asrama Haji Sumatera Barat. Pengawasan dilakukan tidak lain untuk memberikan kenyamanan bagi calon jemaah haji Indonesia.

Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang memimpin kunjungan kerja reses ke Asrama Haji Balikpapan, Kalimantan Timur memberikan apresiasi atas pengelolaan asrama haji yang sangat baik meskipun anggaran terbatas. Kahfi menilai Asrama Haji di Balikpapan memiliki banyak fasilitas seperti tempat berolahraga, lahan

parkir luas, kamar tidur sekelas hotel, ruang teater dan rooftop yang nyaman dan mengarah ke laut.

"Asrama haji ini memiliki beberapa fasilitas, seperti ruang pertemuan yang bisa digunakan oleh jemaah haji atau masyarakat umum. Demikian pula ada teater visualisasi dan edukasi manasik haji yang cukup modern. Ini adalah bentuk kreasi dan inovasi dari teman-teman asrama

haji yang bisa menghadirkan theater edukasi manasik haji yang modalnya, sepenuhnya berasal dari pengelolaan asrama haji," ungkap Ashabul di asrama haji Balikpapan, Rabu (4/10/2023).

Politisi PAN ini, mengapresiasi penggunaan bahan bekas dalam fasilitas teater di asrama haji Balikpapan sebagai bentuk inovasi yang baik. Mereka juga berkomitmen untuk mengalokasikan Rp38 miliar untuk peningkatan fasilitas haji di sana tahun ini sebagai dukungan terhadap upaya pengelola asrama haji.

Kemudian di Sumatera Barat, kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang melakukan pengawasan pembangunan ke Asrama Haji

Embarkasi Padang Pariaman. Marwan mendorong penyelesaian pembangunan asrama haji dipercepat.

"Pembangunan Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman kita lihat masih banyak sarana dan prasarananya yang belum ada, ini harus segera diselesaikan pembangunannya," kata Marwan saat Kunjungan Kerja Reses Ke Provinsi Sumatra Barat, di Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman, Rabu (4/10/2023) lalu.

Lebih lanjut Marwan Dasopang menyatakan dukungan atas kelanjutan pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman sehingga bisa diselesaikan dan segera berfungsi. Menurutnya, untuk pendanaan pembangunan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dananya bersumber dari Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH).

"Kan itu uang haji, jadi nilai manfaatnya dapat dimanfaatkan untuk haji kembali," katanya. Setelah asrama haji itu selesai dibangun, kata dia, maka pemerintah dapat memanfaatkan bangunannya tidak saja untuk jemaah haji, namun juga



FOTO: ANDRI/NR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat meninjau Asrama Haji Embarkasi Padang Pariaman.

hal lainnya yang uangnya dapat membantu operasional.

Sejalan dengan itu Anggota DPR RI John Kenedy Azis mengatakan, pihaknya terus berupaya agar asrama haji tersebut dapat diselesaikan. Meskipun pada 2024 pemerintah mengalokasikan anggaran Rp61,3 miliar untuk melanjutkan pembangunannya melalui dana SBSN, namun ia tetap meminta pemerintah agar pada 2025 besaran

dana kelanjutan pembangunan bisa lebih dari Rp100 miliar.

Sementara di Provinsi Bali, kunjungan Kerja reses yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka melakukan kunjungan lapangan ke Tempat Penitipan Anak Mercy Indonesia dan Yayasan Metta Mama Maggha. Dua tempat yang diketahui merupakan tempat penampungan anak terlantar.

Disampaikan Diah, ada sekitar 50 anak terlantar yang masih balita dan berusia di bawah 3 tahun. Fenomena ini, lanjut Diah, harus menjadi perhatian pemerintah, terutama terkait pencatatan sipil. Dari hasil tinjauan ini, legislator F-PDI Perjuangan itu mengatakan berbagai studi yang ditemukan akan menjadi referensi yang berharga mengingat DPR RI sedang menyusun Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA).

"Perhatian mengenai hak anak, kewarganegaraan, pengasuhan, lalu juga pemenuhan akses kesehatannya itu memang sangat relevan bagi kami di Komisi VIII dengan pembahasan RUU KIA," kata Diah. **mh, man, ndn/mh**



FOTO: NADHEN/NR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka saat memimpin Kunker Reses Komisi VIII ke Provinsi Bali.

Menciptakan Pelayanan Kesehatan Berkualitas

Pelayanan kesehatan yang berkualitas adalah hak dasar setiap individu. Ketidakmerataan pelayanan kesehatan menjadi fokus utama Komisi IX DPR RI. Komisi kesehatan ini secara tekun berupaya menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang merata, memastikan akses yang setara bagi semua warga negara, serta mengatasi disparitas dalam pelayanan kesehatan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan dukungan dan komitmennya terhadap pembangunan sektor kesehatan di Papua Pegunungan. Hal ini menjadi perhatian utama, karena Papua Pegunungan saat ini belum memiliki rumah sakit provinsi, hanya memiliki rumah sakit kabupaten yang perlu ditingkatkan kelasnya.

"Kami mendorong agar Papua Pegunungan memiliki rumah sakit provinsi yang bisa melayani warganya. Saat ini, kita tingkatkan rumah sakit kabupaten sambil berupaya untuk mendirikan rumah sakit provinsi



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena saat mengunjungi salah satu rumah sakit di Papua Barat Daya.

di sini," katanya saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Wamena, Papua Pegunungan, Rabu (4/10/2023) silam.

Komisi IX melakukan kunjungan langsung ke Papua Pegunungan untuk melihat kondisi lapangan dan mendengarkan kebutuhan masyarakat terkait fasilitas kesehatan. Pihaknya berkomitmen memberikan dukungan konkret dalam pengembangan sektor kesehatan, tenaga kerja, dan kependudukan di provinsi tersebut. Komisi IX juga berupaya memenuhi sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan alat medis, dan rekrutmen tenaga kesehatan yang diperlukan.

Ia menambahkan, "Dukungan ini tidak hanya terbatas pada Jayawijaya sebagai ibu kota, tetapi

juga mencakup seluruh tingkat II di Papua Pegunungan. Kami akan memberikan perhatian serius, dan tahun ini kami telah mengalokasikan dana yang signifikan untuk mendukung pembangunan puskesmas baru, dengan total dukungan hampir mencapai Rp1 triliun," katanya.

Tidak hanya di Papua, Komisi IX DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh berkunjung ke RSUP Dr M. Djamil di Padang, Sumatera Barat untuk melihat kondisi fasilitas kesehatan dan mendengar kebutuhan rumah sakit tersebut. Tiga kebutuhan utama yang diidentifikasi adalah Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu (IPJT), Instalasi Pelayanan Stem Cell atau Bank Jaringan, dan pembangunan gedung Kamar Rawat Inap Standar

(KRIS).

Perbaikan fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan hal yang terus didorong Komisi IX. Untuk itu, semua temuan dalam kunjungan ini, lanjut Nihayatul, akan dibahas dalam rapat Komisi IX termasuk kebutuhan dana sekitar Rp180 miliar.

"Kita berharap Kementerian Kesehatan bisa mem 'follow up' hal ini, dan akan kita bawa dalam rapat Komisi IX. Kita tahu, tingkat persoalan (penyakit) jantung di Sumatera Barat ini cukup tinggi, jadi kita harus mengantisipasi hal itu. Rumah Sakit M Djamil ini harus menjadi rumah sakit yang bisa menyediakan fasilitas itu," tandasnya.

Terakhir, Komisi IX DPR RI berkunjung ke Kalimantan Utara dan melakukan pertemuan dengan Pemda setempat. Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati, memberikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kota Tarakan atas pencapaian bidang kesehatan, termasuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) pada Februari 2023 dengan kepesertaan JKN sebesar



FOTO: DEP/NI

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh saat melakukan tinjauan ke RSUP Dr M. Djamil Padang di Padang.

97,89 persen.

Namun, terdapat temuan Dewas BPJS Kesehatan mengenai terbatasnya alat kesehatan dan pelayanan di RS Kaltara dan Tarakan, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. "Saya rasa ini harus menjadi perhatian dan ini akan menjadi

agenda utama agar Kemenkes mensupport pembangunan atau pemenuhan alat-alat kesehatan. Ini perlu ada perhatian yang lebih khusus, karena sayang sekali capaian kepesertaan BPJS-nya sudah banyak, tapi masih harus melewati tahap rujukan-rujukan terlebih dahulu," ujar Kurniasih di Kantor Wali Kota Tarakan, Kaltara, Rabu (4/10/2023) silam.

Kurniasih menyebutkan penurunan angka stunting di Kaltara dari 27,5 persen menjadi 22,1 persen berkat kerja keras tahun 2022. Provinsi Kalimantan Utara juga menjadi salah satu yang tercatat dalam tiga besar nasional untuk provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting di atas 5 persen.

Legislator ini mendorong Pemprov Kaltara dan Pemkot Tarakan terus memprioritaskan program-program strategis kesehatan, termasuk pengendalian penyakit tidak menular, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan demi perlindungan masyarakat dari produk yang tidak aman. — **jka, dep, skr/mh**



FOTO: JAKA/NI

Wakil Ketua Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi IX DPR di Kantor Wali Kota Tarakan.

Kanjuruhan dan UMKM Jadi Perhatian



FOTO: BIANCA/NR

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid saat mengikuti Kunker Reses Komisi X.

Tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi satu tahun lalu masih menyita perhatian banyak pihak, tidak terkecuali Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga. Awal Oktober lalu, Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja reses Ke Kota Malang.

Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid mengatakan, korban tragedi stadion Kanjuruhan masih memiliki aspirasi yang perlu didengarkan dan diperjuangkan. Salah satunya adalah bantuan untuk rehabilitas para korban tragedi Kanjuruhan yang belum tuntas.

"Untuk itu, Komisi X berupaya mendorong pemberian bantuan, seperti Kartu Indonesia Pintar dan

bantuan sosial lainnya, kepada para korban. Kami berharap rekomendasi Komisi X dapat menjadi panduan untuk meningkatkan sepakbola Indonesia, termasuk kepatuhan terhadap standar FIFA dan profesionalisme manajemen sepakbola," katanya.

Sementara di Surakarta, Jateng, delegasi Komisi X DPR dipimpin Abdul Fikri Faqih menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah dan masyarakat untuk

menyerap aspirasi pembangunan pariwisata di Solo. Menurutnya kunjungan itu penting, karena salah satu pembangunan pariwisata di Kota Solo dapat dijadikan 'benchmark' terutama pariwisata berbasis UMKM Batik.

"Solo, Pekalongan, itu kan terkenal dengan batiknya. Di Solo itu orang kalau datang ke sini, seperti halnya di negara lain, Maroko misalnya, itu kan orang datang untuk berbelanja, dibawa ke tempat melihat proses menguliti hingga menjadi produk berbahan kulit yang sudah jadi," ujarnya.

Masukkan itu menurutnya juga sejalan dengan penyusunan Revisi UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata yang sedang dikerjakan Komisi X DPR RI. Revisi

dilakukan karena perkembangan pariwisata menuntut beberapa penyesuaian, utamanya karena terjadinya perubahan paradigma dari *mass tourism* ke *quality tourism*, dan *sustainable tourism*. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah memberikan banyak pelajaran agar sektor pariwisata bertahan di tengah krisis.

Menurut Anggota Komisi X DPR RI Nuroji pentingnya mempromosikan serta memaksimalkan kekayaan budaya dan pariwisata Kota Semarang. Ia menilai kota ini memiliki potensi pariwisata yang banyak dan juga berbagai bangunan bersejarah yang menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia.

Nuroji dengan tegas menyatakan bahwa potensi ini harus dimaksimalkan sebagai aset utama dalam industri pariwisata Semarang. "Jadi itu yang mesti dipromosikan sebagai aset



FOTO: RIDWAN/NIR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin pertemuan Tim Kunker Reses Komisi X ke Kota Solo.

pariwisata di Semarang," ungkapnya. Nuroji menggarisbawahi kepentingan lagu 'Gambang Semarang' dalam membentuk identitas kota Semarang.

Lagu ini bukan hanya sebuah karya seni yang indah, tetapi juga cerminan kaya budaya dan sejarah kota ini.

rdn, skr, bia/mh



FOTO: SINGGIH/NIR

Anggota Komisi X DPR RI Nuroji dalam foto bersama usai pertemuan Kunjungan Kerja Komisi X ke Kota Semarang.

Meningkatkan Pagu KUR Untuk UMKM

Komisi XI DPR RI mendorong Bank Indonesia (BI), OJK, LPS, Himbara, Jamkrindo, dan Askrindo bersinergi dengan pemerintah provinsi untuk memberi perhatian khusus terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan meningkatkan pagu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Demikian mengemuka saat delegasi Komisi XI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi XI Amir Uskara menggelar pertemuan di Sulawesi Selatan (Sulsel) dengan para mitranya di bidang keuangan. Amir menyerukan agar KUR terus ditingkatkan di Sulsel dengan harapan indeks perekonomian Sulsel kembali rebound di atas rata-rata nasional. Hal itu disampaikan Amir Gowa, Sulsel, Rabu (4/10/2023) silam.

"Kalau kita melihat pagu kredit untuk UMKM di Sulsel ini memang masih belum maksimal. Itu sangat kecil, terlihat dari KUR mikro yang digelontorkan perbankan Sulsel masih sangat kecil dibandingkan grade kredit nasional lainnya," ujar politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini, menyayangkan.

Ia optimis pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional di Sulsel bisa



FOTO: PUNTHO/IR

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara saat foto bersama usai memimpin Tim Kunker Reses Komisi XI DPR RI ke Gowa.

rebound kembali sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di atas rata-rata nasional. Bahkan, sampai sekitar 200 basis points di atas rata-rata nasional. Hadir dalam pertemuan itu Deputy Gubernur BI Fillianingsih Hendarta, Kepala Perwakilan BI Sulsel Causa Iman Karana, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK OJK Agusman, Kepala OJK Regional 6 Sulawesi-Maluku-Papua Darwisman, dan Wakil Ketua Dewan Komisiner LPS Lana Soelistianingsih.

Di tempat dan waktu yang sama, Anggota Komisi XI DPR Marinus Gea mengemukakan bahwa penggunaan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) terus meningkat, termasuk saat bertransaksi dengan para pelaku UMKM.

"Saya kira, program yang sudah sangat baik hari ini adalah QRIS itu. Jadi kalau kita belum merasa kesulitan untuk menggunakan QRIS, saya kira ini menjadi alternatif yang sangat baik dan harus kita kembangkan, kita pertahankan," ujar Marinus usai menghadiri kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Gowa, Sulsel, Rabu (4/10/2023) lampau.

Marinus menyatakan, hampir seluruh UMKM di seluruh pelosok tanah air kini menggunakannya sebagai alat pembayaran. Oleh karena itu, Marinus mengapresiasi kinerja BI yang gencar melakukan sosialisasi QRIS, sehingga UMKM menjadi terdigitalisasi. Bahkan, puji politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, inovasi QRIS kini sudah bisa dijadikan sebagai alat bayar bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga internasional.

Sebagaimana diketahui, kini hampir seluruh kegiatan jual beli didukung oleh QRIS, tidak hanya toko-toko besar, banyak UMKM yang menggunakan QRIS untuk proses pembayaran yang telah mencapai 37 juta pengguna. Sebagian besar merchant-nya adalah UMKM, termasuk di tenant-tenant UMKM yang ada di Gowa, Sulsel.

Sementara di Bali, Komisi XI membincang soal infrastruktur yang tujuannya memperkecil kesenjangan ekonomi dan sosial. Dengan visi 'Nangun Sat Kerthi Loka Bali', kebijakan ini melatari pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengingatkan agar kajian arah pembangunan Provinsi Bali 2020-2024 berbasis pada kekuatan pemetaan kekuatan lokal. Menurutnya, nilai ini krusial agar kesenjangan ekonomi antara wilayah bagian utara dan selatan tidak semakin timpang. Dirinya tidak ingin konflik sosial terjadi.

"Kita bicara tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi



FOTO: PUNTHO/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea saat meninjau beberapa tenant UMKM dalam rangka kunker reses Komisi XI DPR RI ke Gowa.

terlihat jelas dan masih terjadi cukup signifikan, menurut saya. Bali itu sendiri, kalau di-*compare* dengan Indonesia secara keseluruhan,

memang pemulihan ekonominya lebih baik, tapi kesenjangan cukup besar," tanggap Didi saat ditemui *Parlementaria* usai mengikuti Kunjungan Kerja Komisi XI DPR di Kabupaten Badung, Bali, Rabu (4/10/2023) lampau.

Padahal, sebelumnya, papar Didi, masyarakat kawasan utara mampu hidup sejahtera karena perputaran ekonomi sektor pertanian dan kelautan yang mampu bersaing di pasar lokal dan mancanegara. Namun kini, ia menyayangkan sumber daya utara semakin surut lantaran pemerintah lebih fokus melindungi sektor pariwisata dan tidak menjaga keberlanjutan potensi kelautan dan pertanian yang telah dimiliki.

Politisi Partai Demokrat itu, mengingatkan, pemerintah melakukan sinkronisasi rencana arah pembangunan di Bali secara komprehensif. Ia pun mengingatkan kekuatan lokal harus jadi pertimbangan vital dalam penyusunan kebijakan maupun implementasinya. — pun, ts/mh



FOTO: SAUIM/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin saat mengikuti Kunker Komisi XI DPR di Bali.

Cegah Karhutla Dengan Sistem Peringatan Dini



FOTO: ARIEF/NR

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini.

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) ditutup pada 6-18 September 2023 akibat kebakaran hutan dan lahan yang dipicu penggunaan suar atau flare dari pengunjung untuk kebutuhan *prewedding*.

Akibat kebakaran tersebut, TNBTS mencatat nilai kerugian mencapai Rp8,3 miliar dengan luasan area kurang lebih 989 hektare. Disebutkan, nilai kerugian tersebut merupakan dampak penutupan kawasan taman nasional akibat karhutla. TNBTS mengklaim, nilai kerugian tersebut belum mencakup biaya operasi

pengeboman air menggunakan helikopter untuk memadamkan kebakaran lahan serta kerusakan jaringan pipa air akibat kebakaran..

Atas peristiwa itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyesalkan terjadinya kebakaran akibat kelalaian pengunjung. Hal itu diutarakan Anggia saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kantor TNBTS. Anggia mengatakan,

pelaku kebakaran akibat kelalaian dapat diberikan hukuman seberat-beratnya. Apalagi, kebakaran lahan ini sangat berdampak kepada lingkungan dan kelestarian lingkungan, serta mengancam kelangsungan hidup manusia.

"Terkait kebakaran di kawasan TNBTS, yang pertama pelaku harus dihukum seberat-beratnya, karena tidak hanya menimbulkan kerugian secara ekonomi, tetapi juga kerugian terhadap konservasi, ekologi, lingkungan, hingga sosial dan budaya," ungkap Anggia.

Politisi Fraksi PKB ini mengingatkan pentingnya mitigasi bencana di destinasi wisata. Di samping kelalaian, kurangnya mitigasi



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan.

bencana menjadi salah satu faktor meluasnya kobaran api. Karena itu, koordinasi antara lembaga termasuk BPBD setempat harus dilakukan supaya tidak terulang kembali di kemudian hari.

Selain itu, Anggia juga menyinggung belum adanya alat pendeteksi kebakaran hutan serta Standar Operating Procedure (SOP) tentang pengunjung yang masuk TNBTS. Peringatan dini bukan sekadar memanfaatkan alat, tetapi

“

Pengawasan dan syarat masuk harus lebih ketat agar tidak kecolongan seperti kejadian ini

Daniel Johan.
Anggota Komisi IV DPR RI

meningkatkan partisipasi masyarakat dan seluruh elemen agar dapat bekerja sama melakukan tanggap bencana.

Anggia juga mendukung alokasi anggaran khusus secara proporsional agar pengelolaan taman nasional seluas 508,2 kilometer persegi bisa terkelola dengan baik. "Anggaran ini harus disesuaikan, diproporsionalkan bukan masalah banyak atau tidaknya. Tapi, kebutuhan untuk konservasi itu berapa, untuk pengelolaan taman nasional itu berapa, dan juga kebutuhan untuk penegakan hukum itu butuh instrumen juga," kata Anggia.

Syarat Masuk Bromo Perlu Diperketat

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB Daniel Johan meminta agar syarat masuk ke Kawasan Bromo diperketat usai insiden kebakaran akibat flare pengunjung. Daniel juga mengusulkan dipasang CCTV untuk meningkatkan pengawasan.

"Pengawasan dan syarat masuk harus lebih ketat agar tidak

kecolongan seperti kejadian ini," ujar Daniel. Ia menyebut, kebakaran savana akibat ulah pengunjung yang membakar flare saat foto *prewedding* merupakan pukulan besar. Dia menyebut insiden itu juga menimbulkan dampak bagi satwa liar di lokasi.

"Ini pukulan buat lingkungan kita, dampak yang ditimbulkan juga sangat besar selain mengancam satwa liar, masyarakat sekitar juga pasti terganggu, selain itu kegiatan wisata jadi terhenti sehingga masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas wisata kehilangan pendapatan," jelas dia.

Lebih lanjut, Daniel menyebut pembakaran flare ini adalah hal yang ceroboh. Sebab, kata dia, saat ini terjadi musim kemarau. "Penggunaan flare di area padang savana di tengah kondisi kekeringan dalam puncaknya adalah tindakan ceroboh apalagi dilakukan hanya untuk mementingkan kepentingan dan kesenangan pribadi tanpa melihat dampak yang terjadi," jelasnya.

ann/mh

Majelis Parlemen Asia Dukung Pembentukan Komite Perempuan

Dalam pertemuan Majelis Parlemen Asia atau *Asian Parliamentary Assembly (APA)* tidak hanya membahas soal penguatan organisasi saja, namun juga resolusi dan evaluasi program. Salah satunya yang menguat soal pembentukan komite perempuan di organisasi APA tersebut.



FOTO: EKO/NR

Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin di sela-sela menghadiri Sidang Majelis Parlemen Asia (*Asian Parliamentary Assembly/APA*) di Baku, Azerbaijan.

“Di APA ini dibicarakan tentang women parlementarian, tapi bagian dari *standing committee* sosial dan budaya. Kita melihat ini sangat penting karena posisi perempuan di Asia ini agak berbeda dan memang ada hal-hal yang sifatnya krusial,” papar Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat menghadiri pertemuan APA di Baku, Azerbaijan, Jumat (22/9) silam.

Sidang APA ini diakuinya memberikan perhatian khusus pada pembentukan komite perempuan. Fadli pun berpendapat posisi perempuan di Asia sangat penting dan harus mendapat perhatian khusus. Selain itu, pada Sidang Komite Sosial dan Budaya APA turut menekankan pentingnya peran APA dalam memperluas kerja sama antara parlemen-parlemen Asia. Fadli berharap kerja sama Parlemen

Asia dapat mewujudkan ikatan kerja sama yang produktif antarnegara-negara Asia, baik kerja sama dalam hal kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya.

“Jadi kami termasuk yang berpendapat harusnya yang telah diadopsi di dalam resolusi-resolusi selama ini bisa dijalankan kemudian ada proses evaluasi-evaluasi juga pelaporan. Ini yang kami sampaikan juga di dalam pertemuan di Baku, Azerbaijan, bagaimana organisasi parlemen ini bisa lebih efektif,” jelas Fadli.

Lebih lanjut politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyinggung soal kesekretariatan organisasi APA agar semakin hari semakin solid dan tertata rapi. Meskipun keragaman bangsa dan budaya di Asia sangat heterogen, solidaritasnya akan menjadi kekuatan bagi organisasi

APA, maka menjadi tantangan yang sangat besar untuk mewujudkannya.

Menyambut soal komite perempuan, Anggota BKSAP DPR RI Puteri Anetta Komarudin menyampaikan, dengan pembentukan komite perempuan ini menjadi salah satu bentuk keseriusan, sehingga harapannya nanti setelah ada komite perempuan, anggota APA bisa memantau keterwakilan perempuan di legislatif di masing-masing keanggotaan APA.

“Kita sangat menyambut baik dengan adanya komite perempuan ini, karena menurut kita representasi perempuan dalam kebijakan publik dan pemerintahan akan bisa didorong apabila ada keseriusan dari masing-masing negara anggota APA,” papar Putri usai sidang.

Menurut Putri, prinsip yang paling penting dalam pembentukan komite

perempuan adalah kesetaraan, karena di berbagai industri termasuk di dalam sektor politik masih banyak sekali kesempatan-kesempatan yang belum bisa dicapai oleh perempuan. Dia berpendapat hal tersebut terjadi karena masih ada bias gender dan masih ada kultur patriarki di berbagai negara Asia.

Melalui organisasi APA ini, para anggota parlemen bisa saling berbagi pengalaman dalam berbagai macam hal termasuk dalam menjunjung kesetaraan gender. "Kita juga bisa belajar bagaimana negara-negara APA yang sudah lebih sukses dalam mendorong representasi perempuan, juga mendorong agar perempuan bisa bertahan di dunia politik dan tentu menyuarakan kepentingan perempuan di dalam pembentukan undang-undang dan juga kebijakan pengawasan serta anggaran yang responsif gender," jelas Putri.

Pariwisata Berbasis Sosial dan Budaya

Pada kesempatan yang sama Anggota BKSAP DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengungkapkan bahwa negara-negara anggota APA akan semakin mempererat hubungan guna



FOTO: EKO/NR

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon dalam foto bersama di sela-sela menghadiri Sidang Komite Sosial dan Budaya, Asian Parliamentary Assembly (APA) atau Majelis Parlemen Asia di Baku, Azerbaijan.

peningkatan pariwisata berbasis sosial dan budaya dan yang tak kalah penting adalah warisan berbasis budaya. Hal tersebut menarik perhatiannya karena menyangkut tugas dan wewenang di Komisi X, sektor yang dia emban sekarang.

"Ada resolusi yang dihasilkan di pertemuan ini, masing-masing negara akan meningkatkan hubungan untuk membangun sebuah upaya peningkatan pariwisata yang berbasis sosial dan budaya serta *heritage* atau warisan

budaya," papar Agustina. Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, di negara-negara Asia kebudayaan dan warisannya sangat kaya, beberapa negara sudah berhasil membangun pariwisata berbasis budaya dan kultur. Dan menurut Agustina, warisan budaya menjadi destinasi wisata yang menghasilkan devisa yang luar biasa.

"Saya juga mendapatkan materi yang cukup banyak dari negara-negara yang hadir di sini bahwa pariwisata dengan mengandalkan warisan budaya dan kekuatan budaya itu bisa menjadi modal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkap Agustina.

Agustina juga melihat di Azerbaijan, dukungan pemerintah setempat dalam bidang infrastruktur sudah sampai pelosok daerah. Menurutnya hal ini bisa menjadi inspirasi bahwa ketika fokus ke satu destinasi, wilayah lain yang menjadi penyangga juga ikut dibangun secara terintegrasi. Kesepakatan peningkatan kerja sama dalam sidang APA kali ini akan ditindaklanjuti pemerintah melalui kementerian dan pemangku kepentingan yang ada.

aha/mh



FOTO: EKO/NR

Anggota BKSAP DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti saat mengikuti sidang Majelis Parlemen Asia atau Asian Parliamentary Assembly (APA) di Baku, Azerbaijan.



DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)



Mercy Chriesty Barends

Serahkan Sembako Bagi Masyarakat Eks Pengungsi di Desa Kariu



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends saat menggelar bakti sosial serta menyerahkan bantuan paket sembako di Maluku.

Pada masa reses, Anggota DPR RI Mercy Chriesty Barends mengunjungi beberapa daerah di Maluku, salah satunya Desa Kariu, Pulau Haruku, Maluku Tengah. Di sini, politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menggelar bakti sosial, berupa penyerahan bantuan paket sembako sebanyak 350 paket. Paket sembako yang tersedia berkat kerja sama Mercy dengan PT Pertamina Hulu Energi.

Bantuan sembako tersebut tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat Kariu yang notabene merupakan eks pengungsi yang telah kembali lagi ke kampung halamannya setelah konflik sosial beberapa tahun silam. Dalam kesempatan tersebut, selain pembagian sembako, Mercy memanfaatkannya untuk merekatkan

tali silaturahmi dengan masyarakat desa Kariu.

Selain itu juga pihaknya mencoba menampung berbagai aspirasi yang diharapkan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat dalam masa persidangan mendatang.

"Kegiatan bakti sosial ini mungkin tidak seberapa jika dilihat dari nilainya,

tetapi biarlah ini semua memberi keberkahan bagi kita. Dan tentu terus kita doakan agar masyarakat desa Kariu terus damai dan sejahtera. Oleh karena itu, saya terus akan menampung aspirasi masyarakat yang kemudian akan saya sampaikan dan perjuangkan kepada pemerintah pusat, melalui DPR RI. Intinya kami akan terus bekerja keras untuk perubahan nasib dan kesejahteraan masyarakat Maluku," papar Mercy.

Meski demikian, dalam kesempatan itu, Mercy juga berpesanan kepada seluruh elemen masyarakat, baik tokoh agama, tokoh pemuda, dan para pemimpin di tingkat RT/RW bersama dengan seluruh stakeholders yang ada di akar rumput, harus bahu membahu bekerja sungguh-sungguh agar bisa mengeluarkan Maluku dari kemiskinan. — ayu/mh

Doni Akbar

Gelar Sosialisasi Transisi Energi Bersih



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Doni Akbar saat mengadakan sosialisasi BUMN dengan tema 'Peran Pertamina Geothermal Energy (PGEO) Dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan'.

Anggota DPR RI Doni Akbar mengadakan sosialisasi BUMN dengan tema 'Peran Pertamina *Geothermal Energy* (PGEO) Dalam Proses Transisi Energi Bersih dan Berkelanjutan' diikuti 200 peserta dari kalangan masyarakat umum dan pelaku UMKM serta tokoh masyarakat yang digelar di Hotel Santika Pekalongan, September 2023 lalu.

Legislator Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemasang, dan Kota Pekalongan ini, menjelaskan PT PGEO merupakan sebuah perusahaan energi yang berfokus

pada pengembangan, eksplorasi, dan produksi energi panas bumi di Indonesia.

Sebagai bagian dari kelompok usaha PT Pertamina (Persero) melalui *Subholding Pertamina New & Renewable Energy* (Pertamina NRE), perusahaan ini memiliki peran strategis dalam mendukung

diversifikasi sumber energi dan keberlanjutan di negara ini.

Dengan kepemimpinan yang kuat dalam industri energi panas bumi, politisi Fraksi Partai Golkar tersebut mengapresiasi PGEO yang berkomitmen memanfaatkan potensi panas bumi Indonesia secara optimal guna menyediakan energi bersih dan ramah lingkungan.

Lebih lanjut, Doni Akbar memuji PGEO memiliki portofolio proyek yang luas dan beragam, sebagai pelaku utama dalam industri energi panas bumi di Indonesia. Dengan teknologi canggih dan tim ahli yang berpengalaman, mereka mengelola rantai nilai produksi energi panas bumi mulai dari eksplorasi hingga distribusi.  pun/mh

Budisatrio Djiwandono

Ajak Milenial dan Generasi Z Gunakan Hak Politik



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI, Budisatrio Djiwandono saat mengadakan Diskusi Publik bertema “Peran Gen Z Menghadapi Pemilu 2024 di Kalimantan Timur” di Samarinda.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono mengajak kaum milenial hingga generasi Z untuk menggunakan hak politiknya di Pemilu 2024. Hal tersebut dia sampaikan di Samarinda pada Diskusi Publik bertema “Peran Gen Z Menghadapi Pemilu 2024 di Kalimantan Timur” beberapa waktu lalu.

“Kami mengadakan diskusi publik bersama generasi milenial dan generasi Z, terkait peranan mereka dalam pemilu nanti. Ada juga acara reses untuk menampung aspirasi-aspirasi mereka,” ungkap Budi. Diketahui, daftar pemilih tetap (DPT) Kaltim sebanyak 2.778.644 pemilih, dan

hampir setengahnya merupakan pemilih dari kalangan pemuda. Budi mengajak pemuda Samarinda menggunakan hak suaranya di Pemilu 2024.

“Gunakan hak pilih kalian, untuk menentukan masa depan negara Indonesia,” pesan Budi, seraya mengimbau kepada seluruh pemuda untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dan penuh gagasan. Ini

menjadi bekal utama pemuda dalam memilih pemimpin bangsa lima tahun ke depan.

“Jadilah pemuda yang inovatif dan mengedepankan semangat persatuan untuk perbaikan bangsa,” tutur Budi. Polisi dari Fraksi Gerindra ini berharap, anak-anak muda bisa memiliki idealis yang tinggi. Tidak mudah terpengaruh dengan politik pragmatis yang kerap terjadi jelang pemilu.

“Pesan saya untuk pemuda, manfaatkan teknologi dan media untuk mencari informasi politik. Carilah rekam jejak terbaik, demi menentukan pemimpin yang cocok untuk Indonesia ke depannya,” pungkas legislator dapil Kaltim itu.

ann/mh

Julie Sutrisno

Memberdayakan Perempuan NTT



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI, Julie Sutrisno saat berfoto bersama usai mengadakan Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Hortikultura, di Ende, NTT.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Julie Sutrisno, mendorong pemberdayaan perempuan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya meningkatkan perekonomian keluarga. Berbagai program harus terus dihadirkan untuk pemberdayaan perempuan.

“Saya melihat perempuan NTT sangat tangguh. Talenta yang besar ini harus kita maksimalkan dengan berbagai program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga,” ujar Julie dalam Bimtek Peningkatan Kapasitas Petani dan Pelaku Hortikultura, di Ende, Flores, NTT, beberapa waktu lalu.

Selain untuk meningkatkan keahlian para petani melalui Program Pekarangan Lestari (P2L), kata Julie, bimtek yang dikhususkan bagi kaum perempuan tersebut juga sebagai upaya mendukung pembangunan ketahanan pangan di NTT. Selain program pemberdayaan, dalam kesempatan itu Julie juga memberikan bantuan bibit unggul, baik sayuran maupun buah-buahan. “Saya ingin semua perempuan di

NTT bisa merasakan dan mendapat program pemberdayaan secara langsung,” tegas Legislator NasDem dari Dapil NTT I (Alor, Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, dan Nagekeo) itu.

Menurut Julie, perempuan NTT memiliki talenta yang besar. Sayangnya, belum seluruh perempuan tersentuh program pemberdayaan. Ini menjadi tantangan bersama memajukan perempuan sebagai pilar peningkatan ekonomi. “Perempuan NTT memiliki talenta yang luar biasa. Jika kita bisa sentuh dengan program pemberdayaan, sudah dipastikan perempuan NTT menjadi garda terdepan dalam peningkatan ekonomi menuju kesejahteraan,” tandasnya.  [tn/mh](#)

Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz Resmikan Jalan Baru di Cianjur



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz saat meresmikan jalan yang baru dibangun milik warga masyarakat dari hasil Program PISEW di Kabupaten Cianjur.

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Barat III Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz berkunjung ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, untuk bersilaturahmi dengan warga setempat di Desa Kertajadi, Kecamatan Cidaun.

Kunjungan ini sekaligus pemotongan pita sebagai peresmian jalan yang baru dibangun milik warga masyarakat dari hasil Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). PISEW merupakan kegiatan infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman skala perdesaan dan meningkatkan kualitas permukiman perdesaan melalui pendekatan

pemberdayaan masyarakat.

"Pembangunan jalan itu merupakan program yang menekankan pada pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan melalui dana Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA. 2023," ujar Neng Eem dalam sambutannya, September lalu.

PISEW ini merupakan program untuk mendukung kebijakan

pemerintah dalam meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur. Tujuannya, mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan permukiman di kecamatan, serta meningkatkan kualitas permukiman perdesaan.

Infrastruktur yang dibangun melalui dana PISEW adalah infrastruktur penunjang produksi pertanian dan juga penghubung antara kecamatan Cidaun dengan kecamatan Naringgul. Ini juga sebagai sarana pendukung pemasaran petani mengangkut hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan.

Pelaksanaan pembangunannya dikerjakan oleh masyarakat desa setempat melalui Kelompok Kerja Antar Desa (KKAD) tidak menggunakan kontraktor.

rdn/mh

Edhie Baskoro Yudhoyono Apresiasi UMKM Pokmas Elang



FOTO: IST/ANR

Edhie Baskoro Yudhoyono saat meninjau langsung aktivitas UMKM Pokmas Elang di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Kerajinan gerabah merupakan bagian dari kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menggunakan bahan dasar dari tanah liat, gerabah bisa dibentuk menjadi berbagai alat yang membantu aktivitas vital masyarakat. Politisi Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono mengapresiasi UMKM kelompok masyarakat (Pokmas) Elang yang konsisten melestarikan kerajinan gerabah.

Warga Desa Kartoharjo, yang sebagian besar merupakan para pengrajin, memproduksi kerajinan gerabah selama lebih dari 60 tahun. Berlokasi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, para pengrajin yang tergabung dalam UMKM Pokmas Elang mampu memproduksi 20 gerabah per hari. Meskipun demikian, para pengrajin

mengeluhkan penjualan gerabah saat ini kurang laku di pasaran, sejak adanya perkakas berbahan plastik yang dinilai lebih ekonomis.

Mendengar keluhan tersebut, Edhie segera meninjau langsung ke UMKM Pokmas Elang tersebut untuk melihat langsung proses produksi gerabah. Ia sangat salut dengan semangat para pengrajin yang didominasi orang tua dan lansia. Meskipun usianya tidak lagi muda,

mereka tetap telaten memproduksi gerabah.

"Promosi kerajinan gerabah harus terus ditingkatkan dan terus didorong. Karena sebetulnya pangsa peminat gerabah masih ada. Selain itu mestinya market bisa saja berbeda dengan plastik, sejauh kualitas, variasi, dan harga tepat, hasil gerabah masih selalu di hati. Tidak kalah juga dengan negara-negara luar yang memproduksi guci atau vas dari keramik, Indonesia punya gerabah," ujar Ibas, sapaan akrab Edhie.

Proses pembuatan gerabah memiliki tahapan yang cukup panjang, mulai dari persiapan tanah liat, proses pembuatan gerabah yang dilakukan secara manual, pembakaran, hingga tahap finishing. Sebagai dukungan nyata, legislator Jatim VII ini memberikan bantuan dua gerobak dorong. — ts/mh

Wisnu Wijaya Adi Putra Salurkan Bantuan Korban Kebakaran di Semarang



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Wisnu Wijaya Adi Putra saat memberikan bantuan kepada korban musibah kebakaran di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang.

Anggota DPR RI Komisi VIII Wisnu Wijaya Adi Putra mengunjungi korban musibah kebakaran yang terjadi di Kelurahan Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Sabtu (23/9/2023) lalu. Meski tidak ada korban jiwa, musibah kebakaran yang terjadi pada 21 September 2023 itu, sedikitnya telah menghancurkan empat unit rumah warga dan satu bangunan poskamling.

Wisnu mengungkapkan, advokasi korban kebakaran yang dilakukan pihaknya melibatkan banyak unsur masyarakat, sehingga dapat berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk segera menerjunkan bantuan logistik bagi para penyintas musibah.

"Alhamdulillah di Kecamatan Genuk ini kami memiliki simpul relawan aksi Semawis (Seduler Mas Wisnu) Peduli yang dikoordinir oleh Mas Ridwan yang mengabarkan kepada kami kondisi riil di lapangan. Laporan tersebut segera kami teruskan kepada Menteri Sosial dan, alhamdulillah, berhasil mendapat *quick response*. Bu Mensos segera memerintahkan Balai Kemensos terdekat, yakni Sentra Terpadu Kartini,

untuk menerjunkan bantuan yang diperlukan ke lokasi kebakaran," terang Wisnu.

Legislator Dapil Jawa Tengah I ini mengungkapkan, relawan PKS adalah salah satu unsur masyarakat yang hadir pertama kali di lokasi bencana untuk membantu penanganan kebakaran di lokasi bencana sekaligus mencatat kebutuhan para pengungsi.

"Aksi sigap para relawan PKS ini patut diapresiasi. Mereka datang sejak awal di lokasi untuk melaporkan apa saja yang menjadi kebutuhan para korban sampai kami datang ke TKP membawa logistik yang diperlukan. Slogan PKS Pelayan Rakyat berhasil diwujudkan dengan kerja nyata oleh para anggota PKS, mulai dari yang bekerja di akar rumput hingga yang mendapat kepercayaan bekerja di level penyelenggara negara," terang Wisnu.  **we/mh**

Muhammad Rizal

Masyarakat Harus Cerdas Mengonsumsi Obat dan Makanan



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Muhammad Rizal saat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang keamanan dan mutu produk obat, kosmetik, obat tradisional, pangan dan bahan berbahaya di Kabupaten Tangerang.

Anggota Komisi IX DPR RI Muhammad Rizal bersama B POM dan tokoh masyarakat menggelar kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, Informasi, dan edukasi (KIE) obat dan makanan di GOR IB Sport Kp. Kebon Baru, Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Selasa (3/10/2023) lalu.

Dalam kegiatan yang dihadiri kepala Balai Besar POM Serang Mojaza Sirait bersama jajarannya, Rizal mengatakan bahwa kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang keamanan dan mutu produk obat,

kosmetik, obat tradisional, pangan, dan bahan berbahaya.

"Masyarakat harus cerdas dalam mengonsumsi obat dan makanan. Terutama obat, gunakan sesuai aturan dokter, belilah pada sarana resmi seperti apotek, rumah sakit, dan klinik. Penggunaan yang tidak tepat dapat merusak kesehatan kita. Bila sedang sakit lebih baik berobat ke

dokter," terang legislator dapil Banten III ini.

Sementara itu kepala Balai Besar POM Serang Mojaza Sirait mengatakan, melalui sosialisasi ini diharapkan masyarakat memilih obat dan makanan yang aman dengan menggunakan aplikasi BPOM *Mobile*, sehingga dapat menghindarkan diri dan keluarga dari bahaya obat dan makanan yang berisiko.

"Masyarakat harus pastikan Cek KLIK (kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsanya) sebelum konsumsi obat dan makanan tersebut," ujarnya. Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 500 peserta terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama, kader puskesmas, kader posyandu, kader PKK, ibu-ibu pengajian, RT/RW, mahasiswa, dan para pemuda. **hal/mh**

Anas Thahir

Dorong Pemerintah Perhatikan Ekraf



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Anas Thahir saat menjadi pemateri seminar Fraksi PPP DPR RI dengan tema "Prospek Kerja Ekonomi Kreatif Bagi GenZ dan Millennial".

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PPP Anas Thahir mendorong pemerintah beri perhatian khusus terhadap para pekerja di sektor ekonomi kreatif (Ekraf). Perhatian itu berupa dukungan insentif dan berbagai fasilitas lainnya, seperti regulasi maupun iklim usaha yang mendorong pertumbuhan Ekraf.

Hal ini dia sampaikan saat menjadi pemateri seminar Fraksi PPP DPR RI pada hari Senin (02/10/2023) dengan tema "Prospek Kerja Ekonomi Kreatif Bagi GenZ dan Millennial". "Kita tidak bisa selamanya mengandalkan eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA)

karena SDA pasti akan habis. Selain habis pertambangan yang terus dieksploitasi akan menimbulkan kerusakan lingkungan," ungkap Anas.

Fakta lain, lanjut Anas, lihat apa yang terjadi di Papua, setelah puluhan tahun tambang emas Freeport beroperasi. "Apakah masyarakat Papua sejahtera?"

Faktanya, sampai sekarang masih belum sejahtera," imbuh Anas. Sebab itu, pihaknya mendorong pemerintah mengandalkan kreatifitas Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Korea Selatan dan Singapura.

Sementara aktor Aditya Herpavi menyampaikan bahwa milenial dan Gen Z memiliki prospek kerja dalam pengembangan Ekraf. Karena menurutnya, Ekraf membutuhkan ide dan inovasi agar eksis dan berkembang. "Millennial dan Gen Z merupakan generasi yang familiar dengan dunia digital. Oleh karenanya dibutuhkan kolaborasi antara Ekraf sebagai dunia kerja dengan generasi milenial dan Gen Z sebagai agency.

— rnm/mh



FOTO: UCHA

Clevan Louis Valera Octavinus

Sang Pembalap Cilik, Harumkan Bangsa

Clevan Louis Valera Octavinus (Valera) adalah duta Indonesia di ajang balap dunia bertajuk FIM MiniGP World Series di Valencia, Spanyol, akhir 2022 lalu. Valera bersama 46 rider muda lain dari berbagai negara siap berjibaku dengan memacu Ohvale. Di balik itu, ada fakta menarik dari Valera pada ajang balap 'Road To MotoGP' yang diinsiasi Dorna Sports.

Valera adalah peserta termuda (10 tahun). Rentang umur peserta FIM MiniGP adalah 10-14 tahun. Ada beberapa pembalap yang umurnya memang 10 tahun. Tapi, Valera pembalap termuda dengan tanggal lahir 28 Agustus 2012. Dia adalah pembalap yang masih berusia 10 tahun saat MiniGP dihelat. Dia memang difokuskan berkiperah di kancah motor sport.

Sejak 'lulus' dari ajang Lenka GP, pembalap yang biasa disapa Valera ini mengikuti beberapa ajang pembinaan. Baik itu FIM MiniGP Indonesia dan juga Astra Honda Racing School (AHRs). Performanya di kedua ajang tersebut pun cukup gemilang.

Valera keluar sebagai juara umum FIM MiniGP Indonesia 2022, karena terus meraih kemenangan, setidaknya satu balapan di setiap seri. Tak pelak ia kokoh di peringkat pertama klasemen akhir dan bisa melanjutkan kiprah ke Valencia musim depan.

"Yakin bisa menang terus, semoga nanti di Valencia juga bisa bagus, *fight* di depan dan semoga bisa podium," optimis Valera kala ditemui awak media beberapa waktu lalu. Sebagai informasi, rider muda tersebut berasal dari sekolah balap *Octvz Racing Academy* yang ditukangi legenda balap motor Bima Octavianus dan Dicky Setiawan.

Sentuhan tangan dingin Bima dan Dicky dinilai sukses mengasah skill up Valera dan menjadi calon rider masa depan Indonesia jika ditangani secara berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dari kesuksesan Valera yang kembali merajai putaran FIM MiniGP Indonesia Series 2022 di Sentul International Karting Circuit, Bogor, pada 2022 lalu. Seperti pada putaran sebelumnya yang juga berlangsung di sirkuit Bukit Peusar Tasikmalaya, Jawa Barat, Valera menguasai podium satu. **tn/mh**



FOTO: RUMI/ANR

Clevan Louis Valera Octavinus (Valera), pembalap belia Indonesia saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar.

Menyosialisasikan Cara Kerja Legislator Kepada Generasi Muda



FOTO: PRIMA/NR

Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI Suratna dalam pembukaan kegiatan Parlemen Remaja 2023 di Bogor, Senin (11/9/2023).

Sekretariat Jendral (Setjen) DPR RI kembali menyelenggarakan kegiatan Parlemen Remaja (Parja). Kegiatan ini berlangsung 11 hingga 16 September lalu di Bogor dan Jakarta. Inilah metode sosialisasi edukatif bagaimana memperkenalkan cara para legislator bekerja kepada generasi muda.

Dikuti 134 siswa/i tingkat SMA/SMK/madrasah aliyah dan sederat, Parja bagian dari pendidikan politik bagi kaum muda untuk memahami lebih jauh dunia politik dan bagaimana sebuah kebijakan publik dirumuskan oleh para wakil rakyat. Kepala Biro Protokol dan Humas Setjen DPR RI, Suratna, menyampaikan, Parja merupakan

amanah organisasi parlemen dunia, IPU (Inter Parliamentary Union) yang menyerukan agar memberi pemahaman politik dan demokrasi bagi kaum muda.

Kegiatan Parja kali ini bertajuk "Remaja Kenal Hukum: Taat Aturan Masyarakat Aman" dengan membahas UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. "Tema ini diambil

dengan tujuan mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya memahami mekanisme politik di DPR tetapi juga memiliki kesadaran hukum.

"Penting bagi generasi muda untuk selalu mentaati peraturan dan hukum yang berlaku di Indonesia, agar dapat menciptakan Indonesia yang aman," jelas Suratna saat memberi laporan pada pembukaan Parja 2023.

Selama program PARJA, peserta diberikan pembekalan mengenai mekanisme kerja DPR RI. Para peserta, menjalani simulasi kerja DPR seperti, kunjungan kerja, simulasi rapat kerja, simulasi rapat paripurna, dan yang berbeda dengan tahun sebelumnya, peserta tahun ini menjalani simulasi rapat panitia kerja.

rnm/mh



FOTO: PRIMA/NR

Para Anggota Parja 2023 saat melakukan Simulasi Kunjungan Kerja ke Polresta Bogor Kota, Rabu (13/9/2023).

Mengenal DPR dengan Magang di Rumah Rakyat

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, program Magang di Rumah Rakyat merupakan bentuk komitmen Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan ruang bagi mahasiswa mendapatkan pengalaman dunia profesi di lingkungan DPR RI.

Program ini dapat menciptakan tenaga kerja yang profesional serta mengenal lebih dekat kerja-kerja lembaga legislatif di Indonesia. Sebab, dalam program tersebut, mahasiswa ikut langsung merasakan kerja-kerja di balik layar DPR RI.

"Ini adalah wujud komitmen



FOTO: PRIMA/NR

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat pembukaan Parlemen Remaja 2023 di Wisma DPR RI, Kopo, Bogor, Senin (11/9/2023).

untuk memberikan kesempatan bagi semua putra-putri terbaik bangsa, berpartisipasi aktif magang di rumah rakyat," ujar Indra dalam Pembukaan

Program Magang di Rumah Rakyat di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2023) lalu. Peserta magang ini diikuti 250 mahasiswa dari 95 perguruan tinggi di Indonesia dan berasal dari 20 provinsi asal perguruan tinggi dan 30 provinsi asal domisili peserta.

Indra menjelaskan, mahasiswa program Magang di Rumah Rakyat mendapat bimbingan dari 50 mentor yang merupakan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI. Pelaksanaan magang tersebut, juga setara dengan 900 jam pelajaran yang akan diisi dengan agenda observasi, kuliah umum, audiensi, magang, simulasi, dan evaluasi. Ia berharap, kesempatan ini dapat mewarnai Indonesia lebih baik dengan mempelajari dinamika politik yang ada di DPR. **rmm/mh**



FOTO: PRIMA/NR

Para Anggota Parlemen Remaja 2023 saat mengikuti simulasi Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II.

Menjaga Kesehatan pada Kondisi Perubahan Iklim

Perubahan iklim berdampak buruk bagi kesehatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, kenaikan temperatur, cuaca ekstrem, perubahan pola penyakit, serta terjadi bencana terkait perubahan iklim. Populasi rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia memiliki risiko yang lebih besar.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2012 yang disusun dalam Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan Akibat Perubahan Iklim, mengidentifikasi empat kelompok prioritas penyakit yang terkena dampak buruk perubahan iklim. Peningkatan jumlah penyakit yang ditularkan melalui vektor dan zoonosis yang disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit yang ditularkan ke manusia melalui hewan atau serangga (malaria dan demam berdarah), penyakit yang ditularkan melalui air (diare), penyakit yang ditularkan melalui udara (Pneumonia, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), dan tuberkulosis), dan terganggunya rantai pasokan makanan, sehingga menyebabkan peningkatan angka gizi buruk (*stunting*, *wasting*, dan *underweight*). Selain itu terdapat pula hal yang masih kurang mendapatkan perhatian, yaitu gangguan tidur dan masalah kesehatan mental.

Berikut beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan dalam kondisi di atas:

1. Modifikasi Tempat Tinggal

Perubahan suhu yang ekstrem dapat memengaruhi kenyamanan

dan kesehatan kita di area tempat tinggal. Perhatikan bagaimana rumah kita menahan atau kehilangan panas. Contohnya, bagaimana mekanisme ventilasi udaranya. Kita bisa memasang gorden atau kerai pada sisi rumah yang menghadap sinar matahari agar tetap sejuk saat cuaca panas. Jika dibutuhkan, bisa juga mempertimbangkan pemasangan kanopi atau peneduh lainnya untuk mencegah cahaya matahari langsung masuk ke dalam rumah. Kita juga bisa memasang *exhaust fan* untuk mengeluarkan udara panas dari ruangan.

Penyimpanan makanan dan minuman juga perlu diperhatikan agar tersimpan pada suhu yang sesuai. Suhu yang lebih hangat dapat mempercepat proses pembusukan makanan dan berpotensi menyebabkan penyakit. Bersihkan area penyiapan makanan untuk menghindari pertumbuhan kuman yang mungkin terjadi pada suhu kamar. Simpan makanan yang mungkin lebih rentan rusak di lemari es dengan suhu yang sesuai.

2. Menciptakan Lingkungan Tidur yang Nyaman

Sebuah studi oleh *One Earth* di tahun 2022 menyatakan bahwa ke



Oleh:
dr. Schoollaus Daleru, S.Kom

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo



depan kenaikan temperatur dapat mengurangi jam waktu tidur per orang setiap tahunnya, khususnya di perkotaan, karena lebih sulit untuk tidur di suhu panas, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendingin atau ventilasi. Kurang tidur kemudian dikaitkan dengan penurunan fungsi kognitif dan imunitas terhadap penyakit, peningkatan risiko cedera kerja, masalah jantung, serta masalah kesehatan mental.

Strategi yang bisa digunakan untuk membantu meningkatkan kualitas tidur kita diantaranya: meminimalisir cahaya dan suara; atur suhu ruangan senyaman mungkin; biasakan rutinitas pola tidur yang konstan setiap harinya; kelola stres dengan relaksasi, meditasi, ataupun journaling; serta biasakan penerapan sleep hygiene (menjaga agar tempat tidur hanya digunakan untuk aktivitas seksual dan tidur saja, sehingga beraktivitas lainnya di tempat tidur harus dihindari, misalnya jika tidak bisa tidur dan ingin bermain ponsel, beranjak dulu dari tempat tidur dan lakukan di tempat lain, dan baru kembali ke tempat tidur jika ingin

mencoba tidur kembali).

3. Mencegah Infeksi Penyakit Tropis

Angka kejadian penyakit tropis seperti demam berdarah dengue, malaria, kaki gajah, tifus, dan tuberkulosis biasanya cenderung meningkat pada kondisi perubahan iklim. Melakukan 3M Plus (menguras, menutup penampungan air, mendaur ulang, plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk seperti penggunaan kelambu dan memasang kasa nyamuk di jendela dan pintu rumah, memakai lotion anti nyamuk, *fogging*) adalah langkah pencegahan penularan penyakit akibat gigitan nyamuk.

Berbagai penyakit lainnya juga dapat dicegah dengan rutin menjaga kebersihan dan kesehatan diri serta lingkungan sekitar kita dengan rajin mencuci tangan dengan sabun antiseptik, menggunakan masker saat bepergian khususnya ke daerah yang padat penduduk atau polusi yang tinggi, serta tidak membuang sampah sembarangan.

4. Menjaga Kesehatan Kulit dan Imunitas Tubuh

Perubahan iklim yang ekstrem dapat menyebabkan intensitas cahaya ultra violet matahari jadi sangat tinggi dan bisa menimbulkan penyakit pada kulit serta memicu kanker. Menghindari kontak langsung dengan cahaya matahari terik terutama pada siang hari dapat mencegah hal tersebut. Misalnya, dengan cara memakai payung saat berjalan di bawah terik matahari dan gunakan tabir surya sesuai dengan kebutuhan.

Pakaian tertutup yang tidak terlalu tebal juga bisa melindungi kulit dari cahaya matahari langsung tanpa membuat kita merasa terlalu gerah. Untuk asupan harian, perbanyak konsumsi air putih dan makanan yang tinggi antioksidan alami seperti biji-bijian, kacang, telur, produk

olahan susu, serta buah dan sayur berwarna cerah, seperti mangga, jeruk, wortel, tomat, dan bayam. Imunitas yang baik juga perlu dijaga dengan membiasakan pola hidup sehat yaitu makan, istirahat, dan olahraga yang cukup dan teratur, menjaga kebersihan, serta konsumsi suplemen penambah daya tahan tubuh bila diperlukan.

5. Mengelola Kesehatan Mental

Kesehatan mental akan memengaruhi kita dalam bekerja, sosial, maupun kehidupan pribadi. Sejumlah cara untuk menjaga kesehatan mental kita diantaranya dengan menjaga kesehatan fisik, menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat, luangkan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan, serta sempatkan menjelajahi alam. Jika merasa kesehatan mental kita tidak sedang baik-baik saja, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional.

Pada akhirnya, selain menjaga kesehatan pribadi, manusia juga sangat perlu sadar untuk selalu ikut aktif berperan serta dalam menjaga kelestarian bumi dan segala isinya. Kita dapat melakukan hal-hal kecil yang jika dilakukan bersama dan menjadi kebiasaan akan berdampak besar terhadap keberlangsungan bumi dan manusia.

Kita bisa memulainya dengan meningkatkan literasi kita terhadap kesehatan kita dan kelestarian lingkungan, mengurangi penggunaan plastik, gunakan transportasi umum untuk bepergian, mengonsumsi diet sehat dari sumber daya lokal, gunakan perangkat mesin, listrik, dan kendaraan dengan bijaksana sesuai kebutuhan, dan selalu dukung program pemerintah dalam menjaga kestabilan iklim. Kelestarian bumi akan menjaga iklim tetap stabil dan pada akhirnya membuat kita lebih terhindar dari berbagai risiko akibatnya. 🌱





Ber-skate Board

di Beach Walk Shopping Center Bali

Malam itu, tepat di momen akhir pekan, *Parlementaria* mencoba menyusuri beberapa daerah yang terkenal ramai di Bali. Sambil menatap ke atas, melihat bulan dan bintang-gemintang sudah menyeruak ke atas langit mempercantik panorama kala itu. Bali adalah pesona Indonesia. Episentrum utama untuk mengukur geliat pariwisata di Indonesia.

Parlementaria tanya beberapa orang, supir ojek, dan membaca beberapa literatur untuk mencari potret aktivitas malam yang lebih bersifat positif dan di area terbuka. Akhirnya, atas saran beberapa orang, *Parlementaria* mencoba mendatangi *Beach Walk*,

Kuta, Badung, Bali. Awalnya pesimis, karena waktu di jam tangan terlihat sudah melebihi pukul 10.00 malam. Khawatir, sudah terlalu malam, terlebih kabarnya pariwisata di Bali belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

Voila! Kekhawatiran itu tidak terbukti. Bali tetap ramai meskipun

hari sudah kian malam. Bahkan, *Parlementaria* menemui di lokasi shopping center itu bukan sekadar muda-mudi, baik wisatawan domestik maupun asing, berbelanja namun juga untuk bermain skate board.

Pantauan *Parlementaria*, muda-mudi tersebut sebagian besar adalah WNI. Mereka berjumlah sekitar 15-20 orang sedang asyik bermain skate board. Serunya, dari mereka ada yang masih berusia sekitar usia SD hingga SMA. Mereka melompat dengan papan skate-nya, tanpa harus takut jatuh terkilir. Bahkan, dari ketinggian, mereka sliding dengan berani dan lancar, memutar papan skate-nya saat melompat kembali ke udara.

"Wow!" seruku kala itu takjub. Dengan pencahayaan yang tidak



Beberapa pemandangan kaum muda yang tengah asyik bermain skate board di Beach Walk, Bali. FOTO: RIDWAN/NR

begitu terang, mereka tetap begitu antusias. Bahkan, teriakan keseruan mereka lebih nyaring dibandingkan debur ombak malam itu. Seolah malam itu, adalah malam yang panjang, untuk menghabiskan segala aktivitas dengan kegiatan positif.

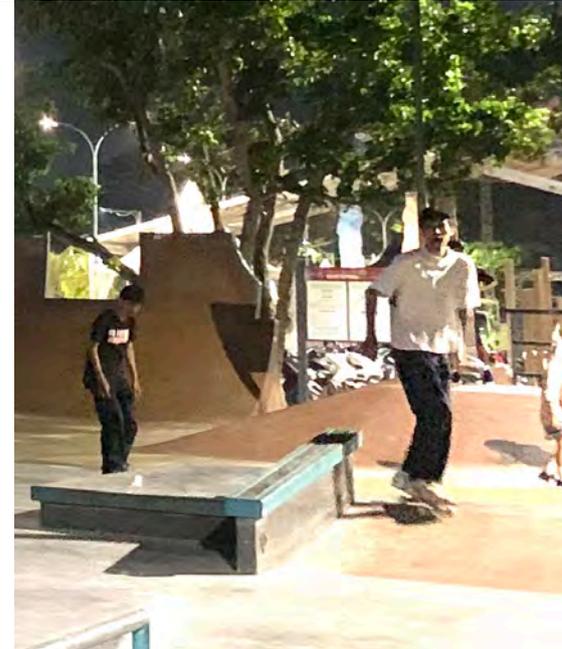
Parlementaria sengaja menelusuri aktivitas malam Bali, khususnya di tempat-tempat terbuka. *Parlementaria* meyakini bahwa pariwisata tidak selalu berkaitan dengan kegiatan negatif dan hanya untuk wisatawan asing. Terbukti beach walk menjadi arena menyenangkan untuk bermain bagi muda-mudi tanpa harus takut dengan adanya kriminalitas di malam hari.

Made, seorang anak muda yang sedang asyik bermain, berkenan untuk wawancara sejenak kepada *Parlementaria*. Bagi Made, hampir tiap malam di akhir pekan, dirinya aktif bermain skate board. Awalnya tidak banyak, namun dia mengajak teman-temannya di sekitar rumahnya untuk terlibat berolahraga bersama dirinya.

Pria yang berusia sekitar lulusan SMA ini, awalnya, mengaku bergantian meminjamkan papan skate untuk bisa merasakan sensasi bermain. "Awalnya hanya ada dua papan skate, namun perlahan masing-masing mereka punya. Sehingga, sekarang tidak ada lagi yang saling pinjam papan skate," ujar Made kepada *Parlementaria*.

Made mengaku ia datang ke lokasi ini dengan bersepeda, namun beberapa temannya ada yang mengendarai sepeda motor. Kencangnya angin malam pinggir pantai tak pernah menyurutkan langkahnya untuk sekadar mengeluarkan keringat dengan bermain skate board itu. "Saya ingin anak-anak muda Bali punya kegiatan positif dan di luar ruangan. Image Bali adalah pariwisata, maka Bali harus ramah kepada siapapun, termasuk untuk remaja tanpa harus terganggu dengan kriminalitas di malam hari," ujarnya.

Saat *Parlementaria* akan pamit sekitar pukul 11 malam, mereka pun masih terlihat antusias bermain. Tak



sedikit pun terlihat lelah di wajah masing-masing muda-mudi ini. Dalam hati, diri ini berharap semoga Bali terus menjaga parameter pariwisata Indonesia dan dunia pada umumnya. Tentu, pariwisata yang tidak hanya dinikmati oleh WNA, namun juga warga domestik, baik dari Bali maupun WNI itu sendiri.

— rdn/mh



Rieke Diah Pitaloka

Koleksi Barang Antik

Mengkoleksi barang antik serasa merawat memori masa lalu. Bagi Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka, ini adalah bagian dari representasi dirinya yang selalu lekat dengan identitas Indonesia.

Setiap koleksi yang Rieke kumpulkan secara telaten akan disimpan di kediaman pribadinya, tepatnya di ruang galeri seni. Salah satu koleksinya berupa deretan lukisan-lukisan sejarah yang berasal dari daerah-daerah di Indonesia, di antaranya Yogyakarta, Malang, dan Bali..

"Salah satu yang aku paling suka lukisan yang ngelukis sahabatku, Mas Bambang. Dia orang Malang. Dia Katholik tapi dia pengagum pejuang-pejuang Indonesia yang muslim terutama perempuan," ucap Rieke.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengakui sedari melajang memang hobi berburu dan mengkoleksi barang antik. Ia terinspirasi oleh hobi neneknya, yang di dalam rumahnya, mengkoleksi barang-barang bercita seni. Selain dari kediaman sang nenek yang khas tempo dulu, Rieke juga sangat terkesan dengan rumah makan Lara Djonggrang, Jakarta Pusat.

"Rumahnya jadi seperti museum. Di sini juga saya punya tempat abu jenazah dari besi-besi gitu, ada koleksi timbangan tua, teko, termos, mesin tik lama. Saya juga koleksi kebaya-kebaya tua tahun 1930-an

atau 1950-an dan masih suka saya pakai," ungkapnya.

Rieke menegaskan barang antik asal Indonesia selalu mencuri perhatiannya. Jika berkunjung ke luar negeri atau ke luar kota, target utamanya adalah datang ke pasar loak. Rieke hanya menekankan bahwa ia memang menyukai gaya lama.

Menutup cerita singkatnya, dirinya mengakui barang dan bangunan tua selalu memiliki daya tarik. Namun, sebagai politisi perempuan, ia mengakui bahwa lukisan Cut Nyak Dien yang ia miliki di rumah menjadi inspirasinya dalam mengemban amanah politik. "Saya memang menyukai karakter Cut Nyak Dien sekuat batu. Dan saya memang mengidolakan Cut Nyak Dien. Dia panutan saya dalam berpolitik," tandas legislator Jawa Barat VII itu.  ts/mh

Indonesia Punya Dua Ibu Kota, Kok Bisa?

Tahukah kamu kalau secara *de jure* Ibu Kota Indonesia saat ini ada dua? Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, saat ini secara *de jure* Ibu Kota Indonesia ada dua, yakni Jakarta dan Nusantara.



FOTO: JAKA/NR

Ketua Komisi II Doli Kurnia Tanjung saat menyerahkan laporan usai DPR RI mengesahkan RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang (UU) di Rapat Paripurna DPR RI.

Komisi II sudah menyampaikan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar mengajukan usul revisi Undang-Undang DKI Jakarta. Namun, hingga artikel ini ditulis, pemerintah belum juga mengajukan usul mengubah UU Jakarta, sehingga nampaknya Indonesia akan berjalan dengan dua ibu kota sampai waktu yang belum diketahui.

"Tinggal nunggu pemerintah aja, kapan mereka menyampaikan rencana perubahan tentang undang-undang DKI Jakarta," kata politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Dengan disepakatinya RUU tentang Perubahan atas UU No.3/2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) dibawa ke Paripurna, Doli mengatakan, seharusnya pemerintah segera melakukan usulan perubahan Undang-Undang DKI Jakarta.

Di sisi lain, Penjabat (pj) Gubernur DKI Jakarta mengisyaratkan, penetapan perubahan itu masih lama karena pembahasannya memerlukan waktu panjang dan dilakukan secara hati-hati serta cermat. Pemindean status ini juga akan memengaruhi banyak hal, termasuk aspek keuangan. Jadi, kok, bisa Indonesia punya dua ibu kota?

we/mh



SELAMAT MEMPERINGATI HARI KESAKTIAN

PANCASILA

01 Oktober 2023



Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 2023. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari bangkit untuk bersatu, semangat persatuan Indonesia.

